



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan penyesuaian pengaturan retribusi daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surakarta;
- b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- c. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder ordonantie Staatsblad 1926 Nomor 226 sebagaimana diubah dengan Staatsblad 1940 Nomor 450);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain yang berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
28. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
29. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1971 tentang Balai Peristirahatan "Maliawan" di Tawangmangu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor

- 12 Tahun 1981 tentang Perubahan Untuk Kedua Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1971 tentang Balai Peristirahatan "Maliawan" Di Tawangmangu (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 17 Tahun 1981 Seri B Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 15 Tahun 1991 tentang Usaha Penginapan Remaja (Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 12 Tahun 1991 Seri B Nomor 4);
 31. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 2007 Nomor 8);
 32. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1999 Seri B Nomor 2);
 33. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Surakarta Nomor 6 Tahun 2003 Seri B Nomor 1);
 34. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1998 Seri A Nomor 2);
 35. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 14 Tahun 1999 Seri B Nomor 8);
 36. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1999 Nomor 5 Seri B);
 37. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 1 Seri B);
 38. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 15 Seri B Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
 39. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2002 Nomor 1 Seri B);

40. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pencegahan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2002 Nomor 4 Seri B);
41. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2002 Nomor 5 Seri B);
42. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Ikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2003 Nomor 8 Seri B);
43. Peraturan Daerah Kota Surakarta Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 9 Seri E);
44. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2005 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 Nomor 7 Seri D Nomor 1);
45. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
46. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);
47. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 8);
48. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 2);
49. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 9);
50. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);
51. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kota Surakarta dengan persetujuan bersama Walikota Surakarta.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan sumber daya alam, barang, parasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi

- karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai perhimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
 22. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
 23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
 24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menurut cara yang diatur ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan barang bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 25. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 26. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
 27. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
 28. Barang Dalam Keadaan Terbungkus adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup, yang bila ingin membukanya atau mengeluarkan isinya harus merusak pembungkusnya, yang bahan pembungkusnya terbuat dari kertas, plastik, kayu, kaleng, gelas, atau bahan pembungkus lainnya.

BAB II OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Objek Retribusi adalah :

- a. Jasa Umum;
- b. Jasa Usaha; dan
- c. Perizinan Tertentu.

Pasal 3

- (1) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (3) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu Objek dan Jenis Retribusi

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - j. Retribusi Tera/Tera Ulang;
 - k. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kedua Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 6

- (1) Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 7

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, puskesmas rawat inap, laboratorium kesehatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah, jenis pelayanan kesehatan, pemakaian alat dan obat-obatan serta jangka waktu perawatan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pada Rumah Sakit Umum Daerah Surakarta, Unit Pelaksana Teknis Puskesmas, Puskesmas Pembantu, puskesmas keliling, puskesmas rawat inap, laboratorium kesehatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, ditetapkan dalam Lampiran I yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Khusus

Pasal 11

Peserta program Asuransi Kesehatan (ASKES) Pegawai Negeri Sipil, Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) dan jaminan kesehatan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah merupakan wajib retribusi yang pembayarannya melalui klaim.

Pasal 12

- (1) Dikecualikan sebagai wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah peserta Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS), orang yang menerima pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama di Puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, puskesmas rawat inap dalam program Asuransi Kesehatan (ASKES) Pegawai Negeri Sipil, dan Jaminan Kesehatan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Peserta program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan wajib retribusi yang pembayarannya melalui klaim.
- (3) Pengelolaan program Asuransi Kesehatan (ASKES) Pegawai Negeri Sipil, Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1 Nama dan Objek Retribusi

Pasal 13

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 14

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi kegiatan:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. pengolahan/atau pemusnahan sampah di tempat pembuangan akhir.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi perkiraan volume sampah yang dapat dikumpulkan berdasarkan jenis kegiatan usaha dan intensitas kegiatan usaha.
- (2) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan luas lantai bangunan, rumah tangga, perdagangan, dan industri.
- (3) Klasifikasi perkiraan volume sampah sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dalam Lampiran II yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 17

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dipungut retribusi dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 18

Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas :

- a. kartu tanda penduduk
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas penduduk musiman;
- d. kartu keluarga; dan
- e. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan dalam Lampiran III yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pelayanan Pemakaman

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 21

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman.

Pasal 22

Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah pelayanan pemakaman yang meliputi :

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan; dan
- b. sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tempat dan jenis pelayanan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 24

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman ditetapkan dalam Lampiran IV yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 25

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 26

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengaturan;
 - b. penataan/penempatan;
 - c. penertiban; dan
 - d. kemudahan informasi.
- (3) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

- (1) Tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum diukur menurut zona tempat, jenis kendaraan, sifat, dan waktu penggunaan.
- (2) Pengaturan zona parkir diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dalam Lampiran V yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 29

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasal 30

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas letak, zona tempat, kelas pasar, luas tempat dasaran, alokasi beban biaya yang dipikul untuk menyelenggarakan fasilitas pasar.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari pelataran, los, kios, letak, zona tempat, kelas pasar, jangka waktu pemakaian, dan pemakaian daya listrik.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran VI yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 33

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 34

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi :
 - a. pemeriksaan kondisi laik jalan;
 - b. pembuatan nomor uji;
 - c. pembuatan, pemasangan dan pengecatan tanda samping; dan
 - d. penerbitan buku uji baru dan penggantian buku uji.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah, kendaraan milik Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia, mobil penumpang pribadi, dan sepeda motor.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan frekuensi pengujian kendaraan bermotor dan Jumlah Berat Diperbolehkan (JBB) kendaraan bermotor.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 36

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan JBB kendaraan bermotor kecuali kereta gandeng, kereta tempelan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dalam Lampiran VII yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 37

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Pasal 38

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
- (2) Pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana pada ayat (1) adalah :
 - a. pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran pada gedung untuk pelayanan umum, bangunan industri perdagangan dan gedung bertingkat termasuk gedung parkir dengan pemasangan stiker;
 - b. pemeriksaan atau penelitian gambar-gambar rencana dan pengetesan pada gedung; dan

- c. pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran bagi perusahaan yang memproduksi, mengimpor, memberdayakan atau mengedarkan segala jenis alat pemadam kebakaran.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dimiliki atau dipergunakan di tempat ibadah, rumah tinggal, dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. permintaan untuk pendidikan dan pelatihan, keterampilan pencegahan dan pemadaman kebakaran.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 39

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis, dan ukuran alat pemadam kebakaran yang diperiksa dan atau diuji.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 40

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan berdasarkan jumlah, jenis, dan ukuran alat pemadam kebakaran.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dalam Lampiran VIII yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 41

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i dipungut retribusi dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Pasal 42

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 adalah pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencetakan peta; dan
 - b. pengadministrasian.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 43

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan pengukuran, pembuatan gambar, dan pencetakan peta.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 44

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dihitung berdasarkan penjumlahan pelayanan pengukuran, cetak peta, biaya gambar, dan biaya administrasi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dalam Lampiran IX yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 45

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pasal 46

Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 adalah pelayanan tera/tera ulang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 47

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan/atau barang dalam keadaan terbungkus, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 48

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dalam Lampiran X yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas
Retribusi Pelayanan Pendidikan

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 49

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf k dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan.

Pasal 50

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
 - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 51

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa ditentukan berdasarkan jenis pelayanan pendidikan yang diperoleh.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 52

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan ditetapkan dalam Lampiran XI yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 53

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf l dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 54

Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 55

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang menjadi dasar alokasi beban biaya yang dipikul oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengendalian menara telekomunikasi.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 56

- (1) Besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari NJOP yang digunakan sebagai dasar penghitungan PBB menara telekomunikasi.
- (2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan ditetapkan dalam Lampiran XII yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENYELENGGARAAN RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu
Objek dan Jenis Retribusi

Pasal 57

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kedua
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 58

- (1) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 59

- (1) Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 60

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 61

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Objek pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian lapangan olahraga;
 - c. pemakaian ruang di atas saluran;
 - d. pemakaian gedung/ bangunan;
 - e. pemakaian kios/ los di atas tanah Pemerintah Daerah;
 - f. pemakaian laboratorium;
 - g. pemakaian insenerator atau pembakaran sampah medis;
 - h. pemakaian kendaraan;
 - i. pemakaian alat-alat berat;
 - j. pemakaian kolam ikan;
 - k. pemakaian depo ikan; dan
 - l. pemakaian pasar ikan.
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 62

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan :

- a. pemakaian tanah didasarkan pada lokasi, luas tanah, waktu pemakaian dan peruntukannya;
- b. pemakaian lapangan olah raga didasarkan pada luas, fasilitas, lokasi, waktu pemakaian dan peruntukannya;
- c. pemakaian ruang di atas saluran didasarkan pada lokasi dan luasannya;
- d. pemakaian gedung/bangunan didasarkan pada luas, fasilitas, lokasi, waktu pemakaian, dan peruntukannya;
- e. pemakaian kios/los diatas tanah pemerintah daerah didasarkan pada luas, fasilitas, lokasi, waktu pemakaian, dan peruntukannya;
- f. pemakaian laboratorium didasarkan pada jenis alat, bahan, waktu pemakaian, dan peruntukannya.
- g. pemakaian insenerator atau pembakaran sampah medis didasarkan pada volume sampah yang dimusnahkan.
- h. pemakaian kendaraan didasarkan pada jarak tempuh, waktu pemakaian, dan peruntukannya;
- i. pemakaian alat-alat berat didasarkan pada jenis alat berat, waktu pemakaian, dan peruntukannya;

- j. pemakaian kolam ikan didasarkan pada luas kolam, waktu penggunaan, dan fasilitasnya;
- k. pemakaian depo ikan didasarkan pada biaya operasional dan biaya perawatan; dan
- l. pemakaian pasar ikan didasarkan pada luas kios/los, waktu penggunaan, dan fasilitasnya.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 63

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan dalam Lampiran XIII yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Terminal

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 64

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b dipungut retribusi dengan nama Retribusi Terminal.

Pasal 65

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum;
 - b. tempat kegiatan usaha; dan
 - c. fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, berupa :
 - 1. ruang tunggu penumpang
 - 2. pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taxi (masuk kelompok tempat khusus parkir).
 - 3. jasa penitipan barang
 - 4. jasa pencucian kendaraan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 66

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal, jenis pelayanan, dan jenis kendaraan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 67

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi terdiri dari biaya-biaya penatausahaan, penerbitan dokumen, pengawasan dan pengendalian lapangan, kebersihan, penerangan, penyusutan dan pemeliharaan.

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Terminal ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran XIV yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 68

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Pasal 69

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 70

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi tempat parkir, jenis kendaraan, dan waktu penggunaan berdasarkan tarif progresif.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 71

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ditetapkan dalam Lampiran XV yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 72

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa.

Pasal 73

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 74

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian fasilitas tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 75

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 digolongkan berdasarkan jenis tempat penginapan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran XVI yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 76

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf e dipungut retribusi dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan.

Pasal 77

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 78

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis ternak yang dipotong.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 79

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ditetapkan dalam Lampiran XVII yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 80

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf f dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 81

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis pelayanan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penggunaan fasilitas tempat rekreasi Sriwedari; dan
 - b. penggunaan fasilitas tempat rekreasi Balekambang.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 82

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 83

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ditetapkan dalam Lampiran XVIII yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 84

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf g dipungut retribusi dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 85

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

- (2) Hasil Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bibit tanaman;
 - b. bibit ternak;
 - c. benih ikan; dan
 - d. hasil produksi usaha daerah lainnya.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 86

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume penjualan hasil produksi usaha daerah.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 87

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ditetapkan dalam Lampiran XIX yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V
PENYELENGGARAAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu
Objek dan Jenis Retribusi

Pasal 88

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan; dan
 - d. Retribusi Izin Trayek.

Bagian Kedua
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 89

- (1) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh ijin tertentu yang bersangkutan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perijinan tertentu.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 90

- (1) Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 91

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 92

- (1) Objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kegiatan pemeriksaan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB); dan
 - b. pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dan cagar budaya.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 93

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan menggunakan faktor luas lantai bangunan, jumlah lantai bangunan, dan fungsi bangunan.
- (2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bobot koefisien.
- (3) Koefisien lantai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

| | |
|----------|-------|
| Lantai 1 | 1.000 |
| Lantai 2 | 1.090 |
| Lantai 3 | 1.120 |
| Lantai 4 | 1.135 |
| Lantai 5 | 1.162 |
| Lantai 6 | 1.197 |
| Lantai 7 | 1.236 |
| Lantai 8 | 1.263 |

| | |
|-----------|-------|
| Lantai 9 | 1.291 |
| Lantai 10 | 1.323 |
| Lantai 11 | 1.352 |
| Lantai 12 | 1.381 |
| Lantai 13 | 1.440 |
| Lantai 14 | 1.439 |
| Lantai 15 | 1.460 |
| Lantai 16 | 1.497 |
| Lantai 17 | 1.526 |
| Lantai 18 | 1.555 |
| Lantai 19 | 1.584 |
| Lantai 20 | 1.613 |
| Lantai 21 | 1.642 |
| Lantai 22 | 1.671 |
| Lantai 23 | 1.700 |
| Lantai 24 | 1.729 |
| Lantai 25 | 1.758 |
| Lantai 26 | 1.787 |
| Lantai 27 | 1.816 |
| Lantai 28 | 1.845 |
| Lantai 29 | 1.874 |
| Lantai 30 | 1.903 |

- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 94

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan dalam Lampiran XX yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 95

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 96

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. hotel berbintang 3, 4, dan 5;
 - b. restoran dengan talem kaca dan talem selaka; dan
 - c. bar, termasuk pub dan diskotik.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 97

Tingkat penggunaan jasa Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diukur berdasarkan kriteria tempat penjualan minuman beralkohol.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 98

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan wilayah tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran XXI yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 99

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf c dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Gangguan.

Pasal 100

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/ kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 101

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas ruangan tempat usaha, indeks gangguan, indeks lokasi, indeks modal dikalikan tarif dasar retribusi izin gangguan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 102

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran XXII yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 103

Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf d dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Trayek.

Pasal 104

Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 adalah pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 105

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan penumpang umum.
- (2) Jumlah izin yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan berdasarkan kebutuhan pada pola jaringan trayek dan wilayah operasi yang diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 106

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan jumlah dan jenis kendaraan penumpang angkutan umum.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran XXIII yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENINJAUAN TARIF

Pasal 107

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 108

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah dan wilayah tempat kedudukan aset Pemerintah Daerah di luar daerah.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI

Pasal 109

Masa retribusi sebagai batas waktu pemanfaatan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah ditetapkan menurut struktur tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IX
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 110

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Hasil pemungutan retribusi merupakan pendapatan Daerah dan harus disetor ke Kas Umum Daerah.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 111

- (1) Tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 112

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 113

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 114

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 115

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 116

- (1) Setiap wajib retribusi wajib membayar retribusi yang terutang berdasarkan surat ketetapan retribusi oleh wajib retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya retribusi.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan:
 - a. SKRD; atau
 - b. dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Walikota atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 117

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Surat Tagihan Retribusi

Pasal 118

- (1) Walikota dapat menerbitkan STRD jika:
 - a. retribusi dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan
 - b. wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya retribusi.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan

Pasal 119

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Keberatan, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 120

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 121

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 122

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Walikota dapat membetulkan SKRD, STRD, atau SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Walikota dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKRD, STRD, atau SKRDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STRD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi penetapan retribusi terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 123

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
PEMERIKSAAN

Pasal 124

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, serta dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 125

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 126

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 127

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 128

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka retribusi yang masih terutang berdasarkan :
1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 15 Tahun 1991 tentang Usaha Penginapan Remaja (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 12 Tahun 1992 Seri B Nomor 4);
 2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1996 tentang Usaha Pemandokan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 17 Tahun 1996 Seri B Nomor 3);
 3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Dan Ikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 24 Tahun 2003 Seri B Nomor 8);
 4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Seri B Nomor 2);
 5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Dispensasi Melalui Jalan Kota (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 18 Tahun 2002 Seri B Nomor 6);
 6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2003 Seri B Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan Dan Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2003 Seri B Nomor 5);
 8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 Nomor 4 Seri C Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 Nomor 6 Seri C Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Perijinan Sarana Dan Tenaga Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2007 Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 7); masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak saat terutang.
- (2) Tarif Parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir mulai berlaku sejak 1 januari 2012.
- (3) Taksiran Nilai Tempat Dasar (TNTD) Pasar disesuaikan mulai berlaku sejak 1 januari 2012.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 129

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
 1. Peraturan Daerah Kotamadya Surakarta Nomor 6 Tahun 1971 tentang Balai Peristirahatan "Maliawan" di Tawangmangu, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perubahan Untuk Kedua Kali Peraturan Daerah Kotamadya Surakarta Nomor 6 Tahun 1971 tentang Balai Peristirahatan "Maliawan" Di Tawangmangu (Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 17 Tahun 1981 Seri B Nomor 10);
 2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 15 Tahun 1991 tentang Usaha Penginapan Remaja (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 12 Tahun 1992 Seri B Nomor 4);
 3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1996 tentang Usaha Pemandokan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 17 Tahun 1996 Seri B Nomor 3);
 4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2001 Seri B Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 18 Tahun 2004 Seri C Nomor 2);
 5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Terminal Penumpang (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2002 Seri B Nomor 1);
 6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Seri B Nomor 2);
 7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2002 Seri B Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2003 Seri B Nomor 4);
 8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pencegahan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 16 Tahun 2002 Seri B Nomor 4);
 9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2002 Seri B Nomor 5);
 10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2003 Seri B Nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan Dan Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2003 Seri B Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Dan Ikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 24 Tahun 2003 Seri B Nomor 8);
 13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2004 Seri E Nomor 9);
 14. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 Nomor 4 Seri C Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 Nomor 6 Seri C Nomor 2);
 16. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 9);
 17. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar dan Perlindungan Pasar Tradisional (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 1);
 18. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 10);
- sepanjang ketentuan pengaturannya masih berlaku, kecuali ketentuan yang mengatur tentang tarif retribusi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1999 Seri B Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2007 Nomor 8);
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1999 Seri B Nomor 2);
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 13 Tahun 1999 Seri B Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 6 Tahun 2003 Seri B Nomor 1);
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 10 Tahun 1999 Seri B Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 23 Tahun 1999 Seri B Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Kota Surakarta Nomor 24 Tahun 1999 Seri B Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2000 Seri B Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2001 Seri B Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 16 Tahun 2003 Seri B Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Dispensasi Melalui Jalan Kota (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 18 Tahun 2002 Seri B Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Perijinan Sarana Dan Tenaga Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2007 Nomor 4);
 11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 8);
 12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 7);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 130

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 25 Agustus 2011

WALIKOTA SURAKARTA,

Ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 27 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

Cap & ttd

BUDI SUHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 7

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH**

I. UMUM

Wewenang Daerah untuk mengadakan retribusi daerah merupakan wewenang yang sangat penting. Tidak saja karena retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi juga karena bersangkutan paut dengan pemberian beban kepada masyarakat. Pada sisi lain, wewenang tersebut harus dilaksanakan secara proporsional, artinya walaupun seluruh aktivitas pelayanan pemerintahan dan pembangunan secara normatif dapat dikategorikan sebagai sumber pemungutan, tetapi Pemerintah Daerah tidak boleh begitu saja menetapkannya sebagai obyek retribusi daerah. Hal ini untuk menghindarkan timbulnya aktivitas pelayanan pemerintahan dan pembangunan yang tidak efisien serta berpotensi memunculkan tindakan ekonomi berbiaya tinggi, yang justru bertentangan dengan semangat desentralisasi kewenangan itu sendiri.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka telah ada semacam panduan dalam kerangka hukum untuk penyelenggaraan retribusi daerah tersebut. Harus diakui bahwa salah satu dampak pemberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut adalah makin ketatnya penetapan sifat dan penetapan retribusi daerah, yang intinya adalah membatasi sektor-sektor pelayanan pemerintahan dan pembangunan yang dapat menjadi obyek pemungutan. Oleh karena itu, ada kemungkinan berkurangnya pendapatan daerah dari sektor-sektor tertentu yang selama ini tanpa kendali hukum yang jelas menjadi obyek pemungutan dalam bentuk retribusi daerah. Namun, jika mencermati undang-undang tersebut, makin lama nampaknya sedapat mungkin pelayanan pemerintahan dan pembangunan harus minimal dalam pemungutan sebagai beban kepada masyarakat, yang pada akhirnya mendorong kreativitas dan penciptaan strategi pembangunan yang berbasis kemandirian daerah untuk pengembangan sumber pendapatan daerah, seperti pengelolaan aset daerah, efisiensi birokrasi, dan sebagainya.

Pemerintah Kota Surakarta memperhatikan benar-benar dampak kebijakan baru tersebut. Untuk memberikan kerangka legal yang tegas dan jelas, serta untuk memberdayakan infrastruktur retribusi daerah supaya lebih akuntabel, transparan, dan tertib administrasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Salah satu pilihan hukum terkait dengan peraturan daerah ini adalah diaturnya secara komprehensif jenis dan obyek retribusi daerah beserta tata cara pemungutannya ke dalam "satu paket" pengaturan. Pilihan hukum demikian di samping untuk efisiensi dan efektivitas penetapan kebijakan, juga untuk memberikan panduan yang terarah demi keberhasilan penyelenggaraan retribusi daerah itu sendiri.

Dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka ditetapkan pemungutan sebagai obyek retribusi daerah sepanjang memenuhi kriteria, yaitu (i) tidak bersifat sebagai pajak; (ii) secara kuantitatif berpotensi untuk memberikan pendapatan; (iii) tersedia sarana dan prasarana pemungutan; dan (iv) menjadi salah satu bentuk aktivitas Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Peraturan Daerah ini diharapkan memenuhi standar penyusunan norma-norma penyelenggaraan retribusi daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Peraturan Daerah merupakan hal yang penting, mengingat undang-undang mengisyaratkan supaya penyelenggaraan retribusi sesuai regulasi yang baru dapat dilaksanakan mulai 1 Januari 2011. Jika penyusunan Peraturan Daerah itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di samping tunduk kepada mekanisme evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri dan pembatalan oleh Presiden, juga dimungkinkan bagi Menteri Keuangan untuk menetapkan sanksi berupa pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

II. PASAL DEMI PASAL

| | |
|----------|--|
| Pasal 1 | Cukup jelas |
| Pasal 2 | Cukup jelas |
| Pasal 3 | Cukup jelas |
| Pasal 4 | Cukup jelas |
| Pasal 5 | Cukup jelas |
| Pasal 6 | Cukup jelas |
| Pasal 7 | Cukup jelas |
| Pasal 8 | Cukup jelas |
| Pasal 9 | Tingkat penggunaan jasa meliputi jenis pelayanan yang diperoleh, jenis alat yang digunakan, tingkat kesulitan, kelas perawatan |
| Pasal 10 | Cukup jelas |
| Pasal 11 | Yang dimaksud pembayaran melalui klaim adalah penagihan pembayaran retribusi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta atas pelayanan kesehatan yang diterima peserta Asuransi Kesehatan (ASKES) Pegawai Negeri Sipil, Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, untuk Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) hanya jasa pelayanan. |
| Pasal 12 | Ayat (1) Cukup jelas |

| | | |
|----------|-------------|---|
| | Ayat (2) | Yang mengambil klaim Dinas Kesehatan. |
| | | Yang dimaksud Pemerintah adalah pemerintah pusat. |
| | Ayat (3) | Cukup jelas |
| Pasal 13 | | |
| | Cukup jelas | |
| Pasal 14 | | |
| | Ayat (1) | Cukup jelas |
| | Ayat (2) | Yang dimaksud sosial adalah panti asuhan dan panti jompo yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Yang dimaksud tempat umum lainnya adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. |
| Pasal 15 | | |
| | Cukup jelas | |
| Pasal 16 | | |
| | Cukup jelas | |
| Pasal 17 | | |
| | Cukup jelas | |
| Pasal 18 | | |
| | Cukup jelas | |
| Pasal 19 | | |
| | Cukup jelas | |
| Pasal 20 | | |
| | Cukup jelas | |
| Pasal 21 | | |
| | Cukup jelas | |
| Pasal 22 | | |
| | Cukup jelas | |
| Pasal 23 | | |
| | Cukup jelas | |
| Pasal 24 | | |
| | Cukup jelas | |
| Pasal 25 | | |
| | Cukup jelas | |
| Pasal 26 | | |
| | Cukup jelas | |
| Pasal 27 | | |
| | Cukup jelas | |
| Pasal 28 | | |
| | Cukup jelas | |
| Pasal 29 | | |
| | Cukup jelas | |
| Pasal 30 | | |
| | Cukup jelas | |
| Pasal 31 | | |
| | Cukup jelas | |
| Pasal 32 | | |
| | Cukup jelas | |
| Pasal 33 | | |
| | Cukup jelas | |

| | | | |
|----------|----------|---------|---|
| Pasal 34 | Ayat (1) | Huruf a | Cukup jelas |
| | | Huruf b | Cukup jelas |
| | | Huruf c | Cukup jelas |
| | | Huruf d | Yang dimaksud penggantian buku uji adalah penggantian rutin dan penggantian kehilangan. |
| | | Huruf e | Cukup jelas |
| | | Huruf f | Cukup jelas |
| | Ayat (2) | | Cukup jelas |
| Pasal 35 | | | Cukup jelas |
| Pasal 36 | | | Cukup jelas |
| Pasal 37 | | | Cukup jelas |
| Pasal 38 | | | Cukup jelas |
| Pasal 39 | | | Cukup jelas |
| Pasal 40 | | | Cukup jelas |
| Pasal 41 | | | Yang dimaksud peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur). |
| Pasal 42 | | | Cukup jelas |
| Pasal 43 | | | Cukup jelas |
| Pasal 44 | | | Cukup jelas |
| Pasal 45 | | | Cukup jelas |
| Pasal 46 | | | Cukup jelas |
| Pasal 47 | | | Cukup jelas |
| Pasal 48 | | | Cukup jelas |
| Pasal 49 | | | Cukup jelas |
| Pasal 50 | Ayat (1) | | Yang dimaksud pendidikan adalah kursus dan pelatihan. |
| | Ayat (2) | | Cukup jelas |

| | |
|----------|---|
| Pasal 51 | Cukup jelas |
| Pasal 52 | Cukup jelas |
| Pasal 53 | Cukup jelas |
| Pasal 54 | Cukup jelas |
| Pasal 55 | Cukup jelas |
| Pasal 56 | Cukup jelas |
| Pasal 57 | Cukup jelas |
| Pasal 58 | Cukup jelas |
| Pasal 59 | Cukup jelas |
| Pasal 60 | Cukup jelas |
| Pasal 61 | Ayat (1) |
| | Cukup jelas |
| | Ayat (2) |
| | Huruf a |
| | Cukup jelas |
| | Huruf b |
| | Cukup jelas |
| | Huruf c |
| | Yang dimaksud pemakaian ruang di atas saluran adalah pembangunan bangunan gedung di atas/dan atau di bawah tanah, air, dan/ atau prasarana dan sarana umum. |
| | Huruf d |
| | Yang dimaksud bangunan termasuk WC. |
| | Huruf e |
| | Yang dimaksud kios adalah tempat berjualan selain di wilayah pasar dan terminal yang diijinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafon, dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa. |
| | Huruf f |
| | Yang dimaksud laboratorium bukan termasuk laboratorium kesehatan |
| | Huruf g |
| | Cukup jelas |
| | Huruf h |
| | Cukup jelas |
| | Huruf i |
| | Cukup jelas |
| | Huruf j |
| | Cukup jelas |
| | Huruf k |
| | Cukup jelas |

| | | | |
|----------|-------------|-------------|---|
| | | Huruf l | |
| | | Cukup jelas | |
| | Ayat (3) | | Yang dimaksud penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/ telepon maupun penanaman/ pembentangan kabel listrik/ telepon di tepi jalan umum, pemakaian tanah yang fungsinya untuk MCK yang dikelola oleh masyarakat. |
| Pasal 62 | | | |
| | Cukup jelas | | |
| Pasal 63 | | | |
| | Cukup jelas | | |
| Pasal 64 | | | |
| | Cukup jelas | | |
| Pasal 65 | | | |
| | Ayat (1) | | |
| | | Cukup jelas | |
| | Ayat (2) | | |
| | | Huruf a | |
| | | | Cukup jelas |
| | | Huruf b | |
| | | | Tempat kegiatan usaha antara lain kios, tempat penjualan karcis PO |
| | | Huruf c | |
| | | | Cukup jelas |
| | Ayat (3) | | |
| | | Cukup jelas | |
| Pasal 66 | | | |
| | Cukup jelas | | |
| Pasal 67 | | | |
| | Cukup jelas | | |
| Pasal 68 | | | |
| | Cukup jelas | | |
| Pasal 69 | | | |
| | Cukup jelas | | |
| Pasal 70 | | | |
| | Cukup jelas | | |
| Pasal 71 | | | |
| | Cukup jelas | | |
| Pasal 75 | | | |
| | Cukup jelas | | |
| Pasal 76 | | | |
| | Cukup jelas | | |
| Pasal 77 | | | |
| | Cukup jelas | | |
| Pasal 78 | | | |
| | Cukup jelas | | |
| Pasal 79 | | | |
| | Cukup jelas | | |
| Pasal 80 | | | |
| | Cukup jelas | | |
| Pasal 81 | | | |
| | Cukup jelas | | |
| Pasal 82 | | | |
| | Cukup jelas | | |
| Pasal 83 | | | |
| | Cukup jelas | | |

| | |
|-----------|--|
| Pasal 84 | Cukup jelas |
| Pasal 85 | Cukup jelas |
| Pasal 86 | Cukup jelas |
| Pasal 87 | Cukup jelas |
| Pasal 88 | Cukup jelas |
| Pasal 89 | Cukup jelas |
| Pasal 90 | Cukup jelas |
| Pasal 91 | Cukup jelas |
| Pasal 92 | Cukup jelas |
| Pasal 93 | Cukup jelas |
| Pasal 94 | Cukup jelas |
| Pasal 95 | Cukup jelas |
| Pasal 96 | Cukup jelas |
| Pasal 97 | Cukup jelas |
| Pasal 98 | Cukup jelas |
| Pasal 99 | Cukup jelas |
| Pasal 100 | Cukup jelas |
| Pasal 101 | Cukup jelas |
| Pasal 102 | Cukup jelas |
| Pasal 103 | Cukup jelas |
| Pasal 104 | Cukup jelas |
| Pasal 105 | Cukup jelas |
| Pasal 106 | Cukup jelas |
| Pasal 107 | Cukup jelas |
| Pasal 108 | Yang dimaksud kedudukan aset Pemerintah Daerah di luar daerah adalah aset daerah yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah tetapi keberadaan aset berada di luar wilayah daerah. |
| Pasal 109 | Cukup jelas |
| Pasal 110 | Cukup jelas |
| Pasal 111 | Cukup jelas |

| | | |
|-----------|-------------|---|
| Pasal 112 | Cukup jelas | |
| Pasal 113 | Cukup jelas | |
| Pasal 114 | Cukup jelas | |
| Pasal 115 | Cukup jelas | |
| Pasal 116 | Cukup jelas | |
| Pasal 117 | Cukup jelas | |
| Pasal 118 | Cukup jelas | |
| Pasal 119 | Cukup jelas | |
| Pasal 120 | Cukup jelas | |
| Pasal 121 | Cukup jelas | |
| Pasal 122 | Cukup jelas | |
| Pasal 123 | Cukup jelas | |
| Pasal 124 | Cukup jelas | |
| Pasal 125 | Ayat (1) | Yang dimaksud dengan “kinerja tertentu” adalah pencapaian target penerimaan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Walikota. |
| | Ayat (2) | Cukup jelas |
| | Ayat (3) | Cukup jelas |
| Pasal 126 | Cukup jelas | |
| Pasal 127 | Cukup jelas | |
| Pasal 128 | Cukup jelas | |
| Pasal 130 | Cukup jelas | |

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SURAKARTA

I. TARIF RAWAT JALAN (PER KUNJUNGAN)

| No. | Kategori Pelayanan | Pendaftaran | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Jumlah |
|-----|--|-------------|-------------|----------------|-----------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| 1. | Pemeriksaan Medis Klinik Umum, Klinik Gigi, KIA/KB | 0 | 9,000,00 | 6,000,00 | 15,000,00 |
| 2. | Pemeriksaan Medis Klinik Spesialis | 0 | 15,000,00 | 10,000,00 | 25,000,00 |
| 3. | Konsultasi ke Spesialis | 0 | 0 | 10,000,00 | 10,000,00 |
| 4. | Pemeriksaan Calon Pengantin | 0 | 15,000,00 | 6,000,00 | 21,000,00 |
| 5. | Konsultasi Gizi | 0 | 0 | 10,000,00 | 10,000,00 |

Catatan : tarif tersebut belum termasuk obat yang diresepkan

II. TARIF INSTANSI GAWAT DARURAT

| KATEGORI PELAYANAN | Pendaftaran | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Jumlah |
|------------------------------------|-------------|-------------|----------------|-----------|
| | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| Pasien Gawat Darurat per kunjungan | 0 | 12,000,00 | 8,000,00 | 20,000,00 |

III. TARIF KAMAR RAWAT INAP PER HARI

| No. | Kelas Perawatan | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | | Jumlah |
|-----|-----------------|-------------|----------------|------------------|------------|
| | | | Dokter Umum | Dokter Spesialis | |
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| 1 | Kelas III | 25,000,00 | 10,000,00 | - | 35,000,00 |
| 2 | Kelas III | 25,000,00 | - | 20,000,00 | 45,000,00 |
| 3 | Kelas II | 35,000,00 | 15,000,00 | - | 50,000,00 |
| 4 | Kelas II | 35,000,00 | - | 25,000,00 | 60,000,00 |
| 5 | Kelas I | 70,000,00 | 20,000,00 | - | 90,000,00 |
| 6 | Kelas I | 70,000,00 | - | 40,000,00 | 110,000,00 |
| 7 | VIP | 140,000,00 | - | 50,000,00 | 190,000,00 |
| 8 | ICU/ICCU | 175,000,00 | - | 75,000,00 | 250,000,00 |
| 9 | PICU/NICU | 175,000,00 | - | 75,000,00 | 250,000,00 |
| 10 | ISOLASI | 100,000,00 | - | 50,000,00 | 150,000,00 |

Catatan :

Tarif rawat Inap bayi normal dan sehat sebesar 50% dari tarif ibunya sesuai kelas.

Tarif tersebut belum termasuk obat yang diresepkan

IV. TARIF PERSALINAN

| Kategori | Kelas Perawatan | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | | | Jumlah |
|--|-----------------|-------------|----------------|-------------|------------------|------------|
| | | | Bidan | Dokter Umum | Dokter Spesialis | |
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| Persalinan Normal | Kelas III | 70,000,00 | 55,000,00 | - | - | 125,000,00 |
| | Kelas III | 70,000,00 | - | 80,000,00 | - | 150,000,00 |
| | Kelas III | 70,000,00 | - | - | 110,000,00 | 180,000,00 |
| | Kelas II | 80,000,00 | 70,000,00 | - | - | 150,000,00 |
| | Kelas II | 80,000,00 | - | 95,000,00 | - | 175,000,00 |
| | Kelas II | 80,000,00 | - | - | 125,000,00 | 205,000,00 |
| | Kelas I | 90,000,00 | 85,000,00 | - | - | 175,000,00 |
| | Kelas I | 90,000,00 | - | 120,000,00 | - | 210,000,00 |
| | Kelas I | 90,000,00 | - | - | 140,000,00 | 230,000,00 |
| Persalinan dengan Penyulit Sedang(KPD, PER, Distosia bahu, presbo,dll) | Kelas III | 150,000,00 | 100,000,00 | - | - | 250,000,00 |
| | Kelas III | 150,000,00 | - | 150,000,00 | - | 300,000,00 |
| | Kelas III | 150,000,00 | - | - | 210,000,00 | 360,000,00 |
| | Kelas II | 230,000,00 | 115,000,00 | - | - | 345,000,00 |
| | Kelas II | 230,000,00 | - | 165,000,00 | - | 395,000,00 |
| | Kelas II | 230,000,00 | - | - | 250,000,00 | 480,000,00 |
| | Kelas I | 300,000,00 | 125,000,00 | - | - | 425,000,00 |
| | Kelas I | 300,000,00 | - | 180,000,00 | - | 480,000,00 |
| Persalinan dengan Penyulit Berat | Kelas III | 220,000,00 | - | - | 250,000,00 | 470,000,00 |
| | Kelas II | 330,000,00 | - | - | 350,000,00 | 680,000,00 |
| | Kelas I | 430,000,00 | - | - | 350,000,00 | 780,000,00 |

Catatan :

1. Partus dengan penyulit, bayi harus dengan pengawasan dokter spesialis anak, dengan jasa medis 40% dari dokter spesialis kandungan.
2. Bila harus dengan tindakan anestesi, dikenakan tarif 40% jasa medis dari dokter kandungan.
3. Biaya bahan habis pakai dihitung tersendiri, tidak termasuk jasa sarana.

V. TARIF TINDAKAN PELAYANAN RESUSITASI BAYI

| No | Uraian | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | | |
|----|-----------------|-------------|----------------|-------------|------------------|
| | | | Bidan | Dokter Umum | Dokter Spesialis |
| 1 | Asfiksia Ringan | 15,000 | 10,000 | 15,000 | 25,000 |
| 2 | Asfiksia sedang | 15,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 |
| 3 | Asfiksia Berat | 15,000 | 16,000 | 24,000 | 50,000 |

VI. TARIF PELAYANAN PERAWATAN BAYI DI INKUBATOR

| No. | Kelas Perawatan | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | | Jumlah |
|-----|-----------------|-------------|----------------|------------------|--------|
| | | | Dokter Umum | Dokter Spesialis | |
| 1 | Kelas III | 15,000 | 10,000 | - | 25,000 |
| 2 | Kelas III | 18,000 | - | 12,000 | 30,000 |
| 3 | Kelas II | 21,000 | 14,000 | - | 35,000 |
| 4 | Kelas II | 24,000 | - | 16,000 | 40,000 |
| 5 | Kelas I | 27,000 | 18,000 | - | 45,000 |
| 6 | Kelas I | 30,000 | - | 20,000 | 50,000 |

VII. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

A. TARIF TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF KECIL

| KELAS | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JUMLAH |
|----------|-------------|----------------|--------|
| IGD/POLI | 12,000 | 8,000 | 20,000 |
| III | 12,000 | 8,000 | 20,000 |
| II | 18,000 | 12,000 | 30,000 |
| I | 24,000 | 16,000 | 40,000 |

JENIS TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF KECIL

- 1 Kanulasi Vena Perifer
- 2 Blok Metacarpal
- 3 Chemical peeling
- 4 Katerisasi kandung Kemih
- 5 Pengeluaran benda asing ekstra okuler
- 6 Tampon hidung anterior
- 7 Nutrisi parenteral
- 8 Dorongan abdomen (parasat heimlich)
- 9 Blok pergelangan kaki
- 10 Blok nervus digitalis
- 11 Blok pergelangan tangan
- 12 Imunisasi Calon Pengantin
- 13 Penghisapan jalan nafas
- 14 Cuci lambung
- 15 Lavement
- 16 Genital interna (kontrol IUD)
- 17 Incisi abses < 3 cm
- 18 Biopsi kulit
- 19 Ekstirpasi kecil
- 20 Ganti tampon
- 21 Ganti perban/kompres
- 22 Pengambilan sekret
- 23 Bebat mata
- 24 cateterisasi
- 25 Epilasi Cilia
- 26 Tonometri
- 27 Funduskopi
- 28 Menjahit luka 1-5 simpul
- 29 Melepas jahitan < 5 simpul
- 30 Lepas DC/WSD
- 31 Medikasi 0 - 5 cm (debridemen,necrotomi)
- 32 Pemasangan Trachi/Traksi
- 33 pemberian makanan lewat sonde feeding
- 34 Pemeriksaan visus dan koreksi
- 35 Penanganan combutio < 10%
- 36 Penanganan hiperpireksi
- 37 Pemasangan O2
- 38 Penanganan pungsi srotum
- 39 Penanganan tranfusi
- 40 Pengambilan benda asing
- 41 Perawatan DC
- 42 Perawatan luka / bekas vakum
- 43 Perawatan luka perineum
- 44 Perawatan payudara
- 45 Perawatan tali pusat
- 46 Premedikasi/preoperasi
- 47 Pengawasan cairan infus
- 48 Reposisi Ringan
- 49 Suction
- 50 Tindik

- 51 Vaginal taucher/rectal taucher
- 52 Vulva hygiene
- 53 Pasang gudel
- 54 Irigasi telinga
- 55 Pemasangan tampon telinga
- 56 Irigasi hidung
- 57 Pemasangan rancel tensocrep fiksasi costae
- 58 Enukleasi, lesi < 3
- 59 Pasang Infus
- 60 Fisioterapi
- 61 Okupasi Terapi

B. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF SEDANG

| KELAS | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JUMLAH |
|-----------|-------------|----------------|--------|
| IGD/ POLI | 30,000 | 20,000 | 50,000 |
| III | 30,000 | 20,000 | 50,000 |
| II | 36,000 | 24,000 | 60,000 |
| I | 42,000 | 28,000 | 70,000 |

JENIS TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF SEDANG

- 1 Biopsi
- 2 Eksterpasi Cahalazion
- 3 Spoeling canalis lakrimalis
- 4 Insisi hordeolum
- 5 Jahit palpebra/conjungtiva
- 6 Irigasi post operasi BPH
- 7 Medikasi luka 5 - 15 cm
- 8 Jahit luka 6 - 15 simpul
- 9 Necrotomi > 5 cm
- 10 Menjahit perineum derajat 3
- 11 Insisi abses > 3 cm
- 12 Pasang gips sederhana
- 13 Pemasangan infus umbilikal
- 14 Intubasi Nasogastrik
- 15 Pemasangan Respirator
- 16 Penanganan combotio > 10%
- 17 Penanganan dekubitus
- 18 Penanganan haemoptoe
- 19 Penanganan kolik (abdominal/ureter)
- 20 Penanganan PEB
- 21 Penanganan dehidrasi sedang
- 22 Plebotomi
- 23 Pungsi asites
- 24 Pungsi cairan lumbal
- 25 Pungsi Vesika urinaria
- 26 Pungsi lumbal
- 27 Aspirasi sungsung tulang
- 28 Vena seksi
- 29 Perawatan fraktur dengan spalk (tanpa gips)
- 30 Reposisi mandibula
- 31 Tampon dubur/reposisi haemorhoid
- 32 Pemasangan tampon hidung anterior
- 33 Pemasangan /pengangkatan tampon
- 34 Tampon hidung posterior
- 35 Pemasangan NGT
- 36 Syringe pump
- 37 Nebuliser
- 38 Infus pump
- 39 Laringoskopi direct
- 40 Hapusan servik

- 41 Versi luar
- 42 Pemasangan /Pelepasan Implant
- 43 Pemasangan/bongkar pesarium
- 44 Pasang IUD (belum termasuk alkon)
- 45 Biopsi tumor telinga dengan lokal anestesi
- 46 Pengambilan serumen proop
- 47 Penyedotan discharge dari telinga
- 48 Pengambilan benda asing di telinga, hidung dan tenggorokan tanpa pembiusan umum
- 49 Injeksi intra dermal
- 50 Elektrofulgurasi
- 51 Ekstrasi komedo ringan
- 52 Enukleasi Miliun ringan (< 3)
- 53 Ekstrasi miliun kelamin
- 54 EC Papilloma < 3
- 55 EC kosmetik keratosis ringan (<10)
- 56 EC fibroma (1 lesi)
- 57 EC kondiloma ringan (lesi <3)
- 58 Cuci/ irigan Vagina
- 59 Enukleasi lesi > 3
- 60 Bedah kimia TCA , lesi > 3
- 61 Alergi test
- 62 Injeksi kenacort
- 63 Pemberian sitostatika
- 64 Mantoux test
- 65 Cabut kuku

C. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF BESAR

| KELAS | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JUMLAH |
|-----------|-------------|----------------|---------|
| IGD/ POLI | 60,000 | 40,000 | 100,000 |
| III | 60,000 | 40,000 | 100,000 |
| II | 66,000 | 44,000 | 110,000 |
| I | 81,000 | 54,000 | 135,000 |

JENIS TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF BESAR

- 1 Resusitasi jantung paru
- 2 Sonde kanalis lakrimalis
- 3 Ekstrasi IUD
- 4 WSD
- 5 Defibrelator
- 6 Ventilator, pemasangan dan pemantauan
- 7 Incisi vurunkulosis/abses telinga
- 8 Incisi haematoma
- 9 Incisi abses mastoid
- 10 Eksterpasi tumor telinga dengan lokal anestesi
- 11 irigasi sinus maksilaris
- 12 Biopsi tumor hidung dan nasofaring
- 13 Bimanual kompresi
- 14 Penanganan dehidrasi berat
- 15 Pemasangan ET
- 16 Penanganan syock
- 17 Penanganan gangguan elektrolit
- 18 Penanganan intoksikasi berat
- 19 Penanganan kejang
- 20 Penanganan koma
- 21 Penanganan status asmatikus
- 22 Perawatan post operasi tonsil
- 23 Perbaikan dawir
- 24 Punksi sumsum tulang
- 25 Reposisi fraktur tulang
- 26 Pasang laminaria

- 27 Sircumsisi
- 28 Douglas punksi
- 29 Kuldosentesis
- 30 Ekstrasi komedo berat
- 31 Ekstrasi milium berat
- 32 Ekstrasi tumor jinak
- 33 EC kosmetik keratosis berat
- 34 EC Papilloma Cutis / skintag > 3
- 35 EC kosmetik keratosis ,lesi > 10
- 36 Ekstirpasi jari tangan/kaki
- 37 Jahit luka > 15

VIII. TARIF PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT

A. RAWAT JALAN MEDIK GIGI DAN MULUT

| Jenis Pelayanan | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Jumlah |
|--|-------------|----------------|---------|
| Tindakan Sederhana : Cabut gigi susu tanpa suntikan, angkat jahitan, trepanasi, tumpatan sementara. | 6,000 | 4,000 | 10,000 |
| Tindakan Kecil : Tambalan tetap (amalgam) Pembersihan karang gigi per rahang | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| Tindakan Sedang : Cabut gigi tetap Cabut gigi susu dengan suntikan Reposisi mandibula | 18,000 | 12,000 | 30,000 |
| Tindakan Besar : Cabut gigi dengan komplikasi Tambalan gigi dengan perawatan syaraf Pembongkaran gigi palsu tukang gigi Ekstirpasi | 33,000 | 22,000 | 55,000 |
| Tindakan operatif tanpa penyulit : Pengambilan gigi impacted kelas I Fiksasi satu gigi Insisi, Alveolectomi | 60,000 | 40,000 | 100,000 |
| Tindakan Operatif dengan penyulit : Pengambilan gigi impacted kelas II | 90,000 | 60,000 | 150,000 |

B. TINDAKAN MEDIK OPERATIF GIGI DAN MULUT

| Kategori | Kelas Perawatan | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Jumlah |
|---|-----------------|-------------|----------------|---------|
| Tindakan : Impacted Kelas III, Kista, Tumor rahang Fiksasi Rahang | Kelas III | 78,000 | 52,000 | 130,000 |
| | Kelas II | 126,000 | 84,000 | 210,000 |
| | Kelas I | 180,000 | 120,000 | 300,000 |

IX. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF

A. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF SEDERHANA (KECIL)

| No | Kelas | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan tindakan | | | | Jumlah |
|----|-------|-------------|-------------------------|------------------|----------|------------------|---------|
| | | | Operator | Asisten operator | Anestesi | Asisten anestesi | |
| 1 | III | 80,000 | 150,000 | 40,000 | 50,000 | 15,000 | 335,000 |
| 2 | II | 80,000 | 300,000 | 75,000 | 100,000 | 30,000 | 585,000 |
| 3 | I | 80,000 | 375,000 | 75,000 | 100,000 | 40,000 | 670,000 |

Catatan : a. Tarif tersebut belum termasuk obat/ bahan habis pakai yang diresepkan

b. Jasa Pelayanan Tindakan medis Operatif CYTO tarif ditetapkan
1,25 X tarif pelayanan tindakan medis

JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF SEDERHANA (KECIL)

- 1 **BAGIAN BEDAH UMUM**
 - a. Cystotomi
 - b. Sirkumsisi dengan narkose
 - c. Incisi/fiksasi luas atau dalam
 - d. Repair luka yang besar dan luas
 - e. Tracheostomi

- 2 **BAGIAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN**
 - a. Perineum repair derajat I dan II
 - b. Perawatan luka bibir rahim
 - c. Perawatan luka pada genital
 - d. Tindakan gynecologis
 - e. Pemasangan tampon vagina
 - f. Pengangkatan tampon uterus dan vagina

- 3 **BAGIAN PENYAKIT MATA**
 - a. Ekstirpasi tumor palpebra
 - b. Jahit palpebra/conjontiva

- 4 **BAGIAN PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN**
 - a. EC Papilloma Lokasi sulit
 - b. Biopsi
 - c. EC Condiloma > 3

B. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF SEDANG

| No | Kelas | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan tindakan | | | | Jumlah |
|----|-------|-------------|-------------------------|------------------|----------|------------------|-----------|
| | | | Operator | Asisten operator | Anestesi | Asisten anestesi | |
| 1 | III | 100,000 | 225,000 | 55,000 | 75,000 | 25,000 | 480,000 |
| 2 | II | 100,000 | 450,000 | 110,000 | 150,000 | 45,000 | 855,000 |
| 3 | I | 100,000 | 565,000 | 140,000 | 185,000 | 55,000 | 1,045,000 |

- Catatan : a. Tarif tersebut belum termasuk obat/bahan habis pakai yang diresepkan.
 b. Jasa Pelayanan Tindakan medis Operatif CYTO tarif ditetapkan 1,25 X tarif pelayanan tindakan medis operatif.

JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF SEDANG

- 1 **BAGIAN BEDAH UMUM**
 - a. Apendektomy kronis/akut tanpa penyulit
 - b. Herniotomi
 - c. Hernioraphi tanpa penyulit
 - d. Hidrokolektomy
 - e. Varikokolektomy
 - f. Kelainan bawaan polidaktili/syndaktili
 - g. Tindakan tindakan laparoscopy endoscopy sedang
 - h. Biopsi Jaringan tumor

- 2 **BAGIAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN**
 - a. Minilaparotomi pada tubektomi
 - b. Laparaskopi diagnostik
 - c. Pengangkatan polip servik
 - d. Marsupialisasi
 - e. Perineum repair derajat III
 - f. Eksplorasi placenta manual
 - g. Curetage
 - h. Pemasangan tampon uterus
 - i. Biopsi carsinoma

- 3 **BAGIAN PENYAKIT DALAM**
 - a. Biopsi pleura

- b. Biopsi hati
- c. Pungsi acites
- d. Pleural punksi

4 BAGIAN PENYAKIT MATA

- a. Ekstirpasi pterigium
- b. Ekstirpasi tumor conjunctiva
- c. Rekontruksi palpebrae
- d. Simbleparotomi
- e. Jahit kornea

C. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF BESAR

| No | Kelas | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan tindakan | | | | Jumlah |
|----|-------|-------------|-------------------------|------------------|----------|------------------|-----------|
| | | | Operator | Asisten operator | Anestesi | Asisten anestesi | |
| 1 | III | 125,000 | 300,000 | 75,000 | 100,000 | 30,000 | 630,000 |
| 2 | II | 125,000 | 600,000 | 150,000 | 200,000 | 60,000 | 1,135,000 |
| 3 | I | 125,000 | 750,000 | 190,000 | 250,000 | 75,000 | 1,390,000 |

- Catatan : a. tarif tersebut belum termasuk obat/bahan habis pakai yang diresepkan
 b. jasa pelayanan Tindakan medis Operatif CYTO tarif ditetapkan 1.25 X tarif pelayanan tindakan medis operatif

JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF BESAR

1 BAGIAN BEDAH UMUM

- a. Laparatomi dengan apendicitis dengan penyulit
- b. Laparatomi pada tumor dalam rongga abdomen
- c. Laparatomi pada ileus obstruksi (perlengketan,volvulus,invaginasi,sumbatan)
- d. Laparatomi pada perdarahan rongga abdomen
- e. Laparatomi pada luka tembus rongga abdomen
- f. laparatomi pada kolostomi
- g. Operasi Haemorhoid
- h.. Hernioraphi/ Herniotomi dengan penyulit

2 BAGIAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

- a. Sectio caesaria
- b. Histerektomy
- c. myomectomy
- d. Embriotomi
- e. laparatomy eksplorasi IUD
- f. Laparascopy besar
- g. Vaginoplasty

3 BAGIAN PENYAKIT MATA

- a. Operasi katarak
- b. Operasi anti gloukoma
- c. E nukleasi bulbi
- d. Evicerasi bulbi
- e. Iridektomi optis

D. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS

| No | Kelas | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan tindakan | | | | Jumlah |
|----|-------|-------------|-------------------------|------------------|----------|------------------|-----------|
| | | | Operator | Asisten operator | Anestesi | Asisten anestesi | |
| 1 | III | 140,000 | 400,000 | 100,000 | 135,000 | 40,000 | 815,000 |
| 2 | II | 140,000 | 800,000 | 200,000 | 265,000 | 80,000 | 1,485,000 |
| 3 | I | 140,000 | 1,000,000 | 250,000 | 335,000 | 100,000 | 1,825,000 |

- Catatan : a. tarif tersebut belum termasuk obat/bahan habis pakai yang diresepkan
 b. jasa pelayanan Tindakan medis Operatif CYTO tarif ditetapkan 1.25 X tarif pelayanan tindakan medis operatif

JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS

1 BAGIAN BEDAH UMUM

- a. Prostatectomy
- b. Nephrectomy
- c. Cystectomy
- d. Radical nect desection
- e. Radikal mastectomy
- f. Operasi vaskuler
- g. Cholecystectomy
- h. Mile"s operasi gasterectomy
- i. Cyste jejunostomose
- j. Rho and Y anastomose
- k. Tindakan laparascopy khusus

2 BAGIAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

- a .Pengangkatan rahim (Hysterectomy)
- b. Hamil di luar kandungan
- c. Ruptur uteri dan laparascopy persalinan abdominal
- d. Penyambungan tuba pada ingin anak
- e. laparatomy pada endometriosis
- f. Laparatomy tumor indung telur dengan perlengketan/multiple cysta ovarii
- g. Laparatomy ca ovarii
- h. Kolphographic
- i. Bilateral cystoma ovarii
- j. Tindakan laparascopy khusus

X. TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK (RADIOLOGI)

| Jenis Pemeriksaan | | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Total | Ket. |
|-------------------|-------------------|-------------|----------------|---------|-------------------|
| 1. | Gigi | 29,000 | 12,000 | 41,000 | |
| 2. | Thorax Dewasa | | | | Flim Uk. Besar |
| | a. 1 Posisi | 38,000 | 12,000 | 50,000 | |
| | b. 2 Posisi | 66,000 | 24,000 | 90,000 | |
| 3. | Thorax anak | | | | Flim Uk. Kecil |
| | a. 1 Posisi | 28,000 | 12,000 | 40,000 | |
| | b. 2 Posisi | 50,000 | 24,000 | 74,000 | |
| 4. | Ekstremitas besar | | | | Flim Uk. Besar |
| | a. 1 Posisi | 38,000 | 12,000 | 50,000 | |
| | b. 2 Posisi | 66,000 | 24,000 | 90,000 | |
| 5. | Ekstremitas Kecil | | | - | Flim Uk. Kecil |
| | a. 1 Posisi | 28,000 | 12,000 | 40,000 | |
| | b. 2 Posisi | 50,000 | 24,000 | 74,000 | |
| 6. | Abdomen Dewasa | | | - | Flim Uk. Besar |
| | a. 1 Posisi | 38,000 | 12,000 | 50,000 | |
| | b. 2 Posisi | 66,000 | 24,000 | 90,000 | |
| | c. 3 Posisi | 99,000 | 36,000 | 135,000 | |
| 7. | Abdomen Anak | | | - | Flim Uk. Kecil |
| | a. 1 Posisi | 28,000 | 12,000 | 40,000 | |
| | b. 2 Posisi | 50,000 | 24,000 | 74,000 | |
| | c. 3 Posisi | 80,000 | 36,000 | 116,000 | |
| 8. | Cranium | | | - | |
| | a. 1 Posisi | 35,000 | 15,000 | 50,000 | |
| | b. 2 Posisi | 59,000 | 20,000 | 79,000 | |
| | c. 3 Posisi | 84,000 | 30,000 | 114,000 | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|---------|--------|---------|---|
| 9. | Cervical | | | - | |
| | a. 1 Posisi | 34,000 | 15,000 | 49,000 | |
| | b. 2 Posisi | 59,000 | 20,000 | 79,000 | |
| | c. 3 Posisi | 84,000 | 30,000 | 114,000 | |
| 10. | Thoracolumbal | | | - | |
| | a. 1 Posisi | 34,000 | 15,000 | 49,000 | |
| | b. 2 Posisi | 59,000 | 15,000 | 74,000 | |
| 11. | Colon Inloop | 188,000 | 25,000 | 213,000 | No. 11 - 20 belum termasuk obat kontras dan alat injeksi |
| 12. | Barium Enema | 175,000 | 25,000 | 200,000 | |
| 13. | Cor Analisa | 145,000 | 25,000 | 170,000 | |
| 14. | Fistulografi | 145,000 | 25,000 | 170,000 | |
| 15. | Cystografi | 115,000 | 25,000 | 140,000 | |
| 16. | Uretrografi | 120,000 | 25,000 | 145,000 | |
| 17. | Intravena Pyelografi | 145,000 | 25,000 | 170,000 | |
| 18. | Oral Cholecystografi | 145,000 | 25,000 | 170,000 | |
| 19. | Retrograde Pyelografi | 145,000 | 25,000 | 170,000 | |
| 20. | Hysterosalpyngografi | 120,000 | 25,000 | 145,000 | |
| 21. | Ultrasonografi | | | - | |
| | a. 1 film | 50,000 | 25,000 | 75,000 | |
| | b. 2 film | 82,000 | 30,000 | 112,000 | |
| | c. 3 film | 113,000 | 35,000 | 148,000 | |
| 22. | Electrokardiografi (EKG) | 16,000 | 9,000 | 25,000 | |

XI. TARIF PELAYANAN PEMAKAIAN OKSIGEN (O₂)

Pemakaian Per Jam

Rp. 100 X lt (dosis) X 60 menit

XII. TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK (LABORATORIUM)

| No. | Jenis Pemeriksaan | Tarif |
|-----|----------------------------|--------|
| A. | HEMATOLOGI DAN KIMIA DARAH | |
| 1 | Darah rutin | 15,000 |
| 2 | Darah lengkap | 20,000 |
| 3 | Golongan Darah | 6,000 |
| 4 | Hemoglobin (Hb) | 5,000 |
| 5 | Angka Leukosit (AL) | 6,000 |
| 6 | Angka Eritrosit (AE) | 6,000 |
| 7 | Angka Trombosit (AT) | 8,000 |
| 8 | Waktu Perdarahan | 5,000 |
| 9 | Waktu Pembekuan | 5,000 |
| 10 | Hematokrit (HCT) | 8,000 |
| 11 | Malaria | 10,000 |
| 12 | M C V | 6,000 |
| 13 | M C H | 6,000 |
| 14 | M C H C | 6,000 |
| 15 | Bilirubin | 17,000 |
| 16 | SGOT | 17,000 |
| 17 | SGPT | 17,000 |
| 18 | Ureum | 17,000 |
| 19 | Creatinin | 20,000 |
| 20 | Cholesterol | 17,000 |
| 21 | HDL Cholesterol | 17,000 |
| 22 | LDL Cholesterol | 17,000 |
| 23 | Tryglyserid | 17,000 |
| 24 | Asam Urat | 20,000 |
| 25 | Glukosa Sewaktu (GDS) | 13,000 |
| 26 | Glukosa Puasa | 13,000 |
| 27 | Widal | 35,000 |

| | | |
|-----------|-------------------------------------|--------|
| 28 | Gamma GT | 25,000 |
| 29 | BBS / LED | 8,000 |
| 30 | VDRL | 25,000 |
| 31 | Hitung jenis leukosit | 10,000 |
| 32 | HbsAg | 35,000 |
| 33 | Protein Total | 20,000 |
| 34 | Albumin | 20,000 |
| 35 | Globulin | 20,000 |
| 36 | Bilirubin Direct | 20,000 |
| 37 | Bilirubin Indirect | 20,000 |
| 38 | Anti HBs Hg | 35,000 |
| | | |
| B. | URINE | |
| 1 | Urine lengkap | 20,000 |
| 2 | Urine rutin | 12,000 |
| 3 | Reduksi | 6,000 |
| 4 | Elwit (Protein) | 6,000 |
| 5 | Test kehamilan | 13,000 |
| 6 | Bilirubin | 6,000 |
| 7 | Sedimen | 6,000 |
| 8 | Drug Abuse | |
| | a. Amphetamin | 25,000 |
| | b. Opiat | 25,000 |
| | c. Cocaine | 25,000 |
| | | |
| C. | FAECES | |
| 1 | Faeces rutin | 10,000 |
| 2 | Telur cacing | 10,000 |
| 3 | Darah samar | 10,000 |
| | | |
| D | PREPARAT APUS / MIKROBIOLOGI | |
| 1 | Siphilis | 25,000 |
| 2 | Gonorrhoe | 25,000 |
| 3 | Pewarna Gram | 15,000 |
| 4 | BTA | 15,000 |
| 5 | Jamur Mikroskopis | 25,000 |
| 6 | Preparat Apus Vagina | 25,000 |

Ket : Untuk pelayanan laboratorium, jasa pelayanan sebesar 25 % dari tarif

XIII. TARIF PELAYANAN FARMASI (APOTEK) UNTUK RAWAT INAP

| Jenis Pelayanan | Tarif | | | Jumlah |
|---|----------------|-------------|----------------|--------|
| | Harga Obat/BPH | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | |
| Harga Obat / Bahan sesuai dengan faktur terakhirnya | 100% | 15% | 10% | 125% |

Untuk obat & alat kesehatan habis pakai ASKES disesuaikan dengan naskah kerja sama (MoU) dan Daftar Patokan Harga Obat (DPHO)

XIV. TARIF PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH

| Keterangan | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Jumlah |
|--------------------------|-------------|----------------|--------|
| Perawatan Jenazah | 45,000 | 30,000 | 75,000 |
| Penitipan Jenazah / hari | 18,000 | 12,000 | 30,000 |
| VE periksa luar | 36,000 | 24,000 | 60,000 |

Catatan :

1. Tarif tersebut belum termasuk bahan / alat habis pakai.
2. Penitipan jenazah paling lama 1 X 24 jam.

XV. TARIF PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS

| No | Kategori Pelayanan | Pendaftaran | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Jumlah |
|----|---|-------------|-------------|----------------|--------|
| 1 | Surat Keterangan Sehat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Surat Keterangan Kematian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Surat Keterangan Visum et Repertum Hidup | 0 | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 4 | Surat Keterangan Visum et Repertum Luar Jenazah | 0 | 35,000 | 25,000 | 60,000 |
| 5 | Pemeriksaan Akupuntur | 0 | 15,000 | 10,000 | 25,000 |

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI PUSKESMAS, PUSKESMAS KELILING, PUSKESMAS PEMBANTU,
PUSKESMAS RAWAT INAP DAN LABORATORIUM
DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA**

I. TARIF RAWAT JALAN (PER KUNJUNGAN)

| NO. | KATEGORI PELAYANAN | JASA SARANA, OBAT, DAN BMHP | JASA PELAYANAN | JUMLAH |
|-----|--------------------|-----------------------------|----------------|--------|
| 1 | Rawat Jalan Umum | 6,000 | 1,500 | 7,500 |
| 2 | Pemeriksaan Gigi | 6,000 | 1,500 | 7,500 |

Catatan : tarif tersebut belum termasuk obat yang diresepkan diluar paket

II. TARIF PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS

| NO. | KATEGORI PELAYANAN | JASA SARANA, OBAT, DAN BMHP | JASA PELAYANAN | JUMLAH |
|-----|---|-----------------------------|----------------|--------|
| 1 | Surat Keterangan Sehat | 6,000 | 1,500 | 7,500 |
| 2 | Surat Keterangan Kematian | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Surat Keterangan Visum et Repertum Hidup | 12,000 | 8,000 | 20,000 |
| 4 | Surat Keterangan Visum et Repertum Luar Jenazah | 35,000 | 25,000 | 60,000 |
| 5 | Pemeriksaan Kesehatan Haji | 12,000 | 8,000 | 20,000 |
| 6 | Pelayanan Imunisasi Haji | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 7 | Pemeriksaan Kesehatan dan Imunisasi Capeng | 10,000 | 5,000 | 15,000 |
| 8 | Pemeriksaan Dokter Spesialis | 9,000 | 6,000 | 15,000 |
| 9 | Pemeriksaan Akupuntur (tidak termasuk jarum) | 6,000 | 4,000 | 10,000 |

III. TARIF PELAYANAN KONSULTASI

| NO. | KATEGORI PELAYANAN | JASA SARANA, OBAT, DAN BMHP | JASA PELAYANAN | JUMLAH |
|-----|--|-----------------------------|----------------|--------|
| 1 | Konsultasi Gizi | 4,500 | 3,000 | 7,500 |
| 2 | Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja | 4,500 | 3,000 | 7,500 |
| 3 | Konsultasi KB | 4,500 | 3,000 | 7,500 |
| 4 | Konsultasi Klinik Berhenti Merokok | 4,500 | 3,000 | 7,500 |
| 5 | Konsultasi Sanitasi | 4,500 | 3,000 | 7,500 |
| 6 | Konsultasi Penyakit Menular Khusus | 4,500 | 3,000 | 7,500 |

IV. TARIF PELAYANAN TINDAKAN

A. TINDAKAN RAWAT JALAN, RAWAT INAP, DAN GAWAT DARURAT

| JENIS TINDAKAN | JASA SARANA, OBAT, DAN BMHP | JASA PELAYANAN | JUMLAH |
|----------------------------|-----------------------------|----------------|--------|
| Tindakan Kecil : | | | |
| - Jahit Luka 1 - 5 jahitan | 12,250 | 5,250 | 17,500 |
| - Debridement luka kecil | 10,500 | 4,500 | 15,000 |
| - Tindik | 7,700 | 3,300 | 11,000 |
| - Ganti Balutan | 10,500 | 4,500 | 15,000 |

| | | | |
|--|--------|--------|--------|
| - Mengangkat benda asing tanpa sayatan | 10,500 | 4,500 | 15,000 |
| - Memecah bisul | 10,500 | 4,500 | 15,000 |
| - Lepas Jahitan | 9,100 | 3,900 | 13,000 |
| - Reposisi Luxatio | 10,500 | 4,500 | 15,000 |
| - Pasang Catheter | 17,500 | 7,500 | 25,000 |
| - Blast Punctie | 10,500 | 4,500 | 15,000 |
| - Pasang Infus | 17,500 | 7,500 | 25,000 |
| Tindakan Sedang : | | | |
| - Jahit luka 5 - 15 jahitan | 24,500 | 10,500 | 35,000 |
| - Cabut kuku | 17,500 | 7,500 | 25,000 |
| - Sirkumsisi normal | 28,000 | 12,000 | 40,000 |
| - Pengambilan benda asing dengan sayatan | 28,000 | 12,000 | 40,000 |
| - Nekrotomi luka sedang | 28,000 | 12,000 | 40,000 |
| - Debridement luka sedang atau luas | 31,500 | 13,500 | 45,000 |
| - Pengambilan benda asing di mata, hidung, telinga | 24,500 | 10,500 | 35,000 |
| - Bilas lambung | 28,000 | 12,000 | 40,000 |
| - Vena seksi | 28,000 | 12,000 | 40,000 |
| - Cutterisasi | 28,000 | 12,000 | 40,000 |
| Tindakan Besar : | | | |
| - Jahit luka lebih dari 15 jahitan | 52,500 | 35,000 | 87,500 |
| - Extirpasi jari tangan / kaki | 52,500 | 35,000 | 87,500 |

B. TINDAKAN KIA DAN KB

| JENIS TINDAKAN | JASA SARANA, OBAT, DAN BMHP | JASA PELAYANAN | JUMLAH |
|--|-----------------------------|----------------|--------|
| - Tindakan IVA Test | 5,250 | 2,250 | 7,500 |
| - C/oagulasi Pre Kanker Serviks | 27,500 | 7,500 | 35,000 |
| - Pengambilan Apusan Pap Smear | 5,250 | 2,250 | 7,500 |
| - Irigasi (Pembersihan) Vagina | 5,250 | 2,250 | 7,500 |
| - Suntik KB | 5,250 | 2,250 | 7,500 |
| - Pemeriksaan dan Pemasangan Implant | 17,500 | 7,500 | 25,000 |
| - Pemeriksaan dan Pelepasan Implant | 35,000 | 15,000 | 50,000 |
| - Pemeriksaan, Pemasangan, dan Pelepasan Implant | 42,000 | 18,000 | 60,000 |
| - Pemeriksaan dan Pemasangan IUD | 14,000 | 6,000 | 20,000 |
| - Pemeriksaan dan Pelepasan IUD | 21,000 | 9,000 | 30,000 |
| - Pemeriksaan, Pemasangan, dan Pelepasan IUD | 28,000 | 12,000 | 40,000 |

Catatan : Tindakan tidak termasuk obat dan alat kontrasepsi

C. TINDAKAN MEDIS GIGI DAN MULUT

| JENIS TINDAKAN | JASA SARANA, OBAT, DAN BMHP | JASA PELAYANAN | JUMLAH |
|--|-----------------------------|----------------|--------|
| Tindakan Sederhana : Cabut gigi susu tanpa suntikan, angkat jahitan, trepanasi, tumpatan sementara. | 5,250 | 2,250 | 7,500 |
| Tindakan Kecil : Tambalan tetap (amalgam) Pembersihan karang gigi per rahang | 14,000 | 6,000 | 20,000 |
| Tindakan Sedang : Cabut gigi tetap Cabut gigi susu dengan suntikan Reposisi mandibula | 14,000 | 6,000 | 20,000 |

| | | | |
|--|--------|--------|---------|
| Tindakan Besar : Cabut gigi dengan komplikasi Tambalan gigi dengan perawatan syaraf Pembongkaran gigi palsu tukang gigi | 21,000 | 9,000 | 30,000 |
| Tindakan khusus tanpa penyulit : Penggambilan gigi impacted kelas I Fiksasi satu gigi | 63,000 | 27,000 | 90,000 |
| Tindakan khusus dengan penyulit : Penggambilan gigi impacted kelas II Fiksasi lebih dari satu gigi Ekstirpasi kecil | 84,000 | 36,000 | 120,000 |

D. LAIN-LAIN

| JENIS TINDAKAN | JASA SARANA, OBAT, DAN BMHP | JASA PELAYANAN | JUMLAH |
|----------------|-----------------------------|----------------|--------|
| - Breast Care | 7,000 | 3,000 | 10,000 |
| - Pijat Bayi | 7,000 | 3,000 | 10,000 |

V. TARIF RAWAT INAP

A. IGD

| NO | KATEGORI PELAYANAN | JASA SARANA, OBAT, DAN BMHP | JASA PELAYANAN | JUMLAH |
|----|--------------------|-----------------------------|----------------|--------|
| 1 | Pemeriksaan IGD | 7,000 | 3,000 | 10,000 |

B. PERAWATAN PER HARI

| NO | KATEGORI PELAYANAN | JASA SARANA, OBAT, DAN BMHP | JASA PELAYANAN | JUMLAH |
|----|---|-----------------------------|----------------|--------|
| 1 | Perawatan Umum | 24,000 | 6,000 | 30,000 |
| 2 | Perawatan Persalinan Ibu dan Bayi | 40,000 | 10,000 | 50,000 |
| 3 | Perawatan Bayi Baru Lahir dengan Kelainan | 24,000 | 6,000 | 30,000 |
| 4 | Visite dokter per hari | 4,500 | 3,000 | 7,500 |

C. PERSALINAN

| NO | KATEGORI PELAYANAN | JASA SARANA, OBAT, DAN BMHP | JASA PELAYANAN | JUMLAH |
|----|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| 1 | Persalinan Normal oleh Dokter | 150,000 | 100,000 | 250,000 |
| 2 | Persalinan Normal oleh Bidan | 90,000 | 60,000 | 150,000 |
| 3 | Persalinan Dengan Penyulit | 210,000 | 140,000 | 350,000 |

VI. PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

A. LABORATORIUM

| NO | KATEGORI PELAYANAN | JASA SARANA, REAGEN, DAN BMHP | JASA PELAYANAN | JUMLAH |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|--------|
| 1. HEMATOLOGI DAN KIMIA DARAH | | | | |
| 1 | Darah Rutin | 9,600 | 2,400 | 12,000 |
| 2 | Darah Lengkap | 13,600 | 3,400 | 17,000 |
| 3 | Golongan Darah | 3,200 | 800 | 4,000 |
| 4 | Hemoglobin | 2,400 | 600 | 3,000 |

| | | | | |
|--|------------------------|--------|-------|--------|
| 5 | Angka Leukosit (AL) | 3,200 | 800 | 4,000 |
| 6 | Angka Eritrocit (AE) | 3,200 | 800 | 4,000 |
| 7 | Angka Trombosit (AT) | 3,200 | 800 | 4,000 |
| 8 | Waktu Pendarahan | 2,400 | 600 | 3,000 |
| 9 | Waktu Pembekuan | 2,400 | 600 | 3,000 |
| 10 | Hematocrit (HCT) | 3,200 | 800 | 4,000 |
| 11 | Malaria | 2,400 | 600 | 3,000 |
| 12 | M C V | 4,800 | 1,200 | 6,000 |
| 13 | M C H | 4,800 | 1,200 | 6,000 |
| 14 | M C H C | 4,800 | 1,200 | 6,000 |
| 15 | Bilirubin | 9,600 | 2,400 | 12,000 |
| 16 | S G O T | 9,600 | 2,400 | 12,000 |
| 17 | S G P T | 9,600 | 2,400 | 12,000 |
| 18 | Ureum | 9,600 | 2,400 | 12,000 |
| 19 | Creatinin | 9,600 | 2,400 | 12,000 |
| 20 | Cholesterol | 9,600 | 2,400 | 12,000 |
| 21 | HDL Cholesterol | 11,200 | 2,800 | 14,000 |
| 22 | LDL Cholesterol | 7,200 | 1,800 | 9,000 |
| 23 | Tryglyserid | 11,200 | 2,800 | 14,000 |
| 24 | Asam Urat | 11,200 | 2,800 | 14,000 |
| 25 | Glukosa Sewaktu | 9,600 | 2,400 | 12,000 |
| 26 | Glukosa Puasa | 9,600 | 2,400 | 12,000 |
| 27 | Widal | 13,600 | 3,400 | 17,000 |
| 28 | Gamma GT | 13,600 | 3,400 | 17,000 |
| 29 | BBS / LED | 4,000 | 1,000 | 5,000 |
| 30 | V D R L | 17,600 | 4,400 | 22,000 |
| 31 | Hitung Jenis Leukosit | 5,600 | 1,400 | 7,000 |
| 32 | HbsAg | 22,400 | 5,600 | 28,000 |
| 33 | Protein Total | 9,600 | 2,400 | 12,000 |
| 34 | Albumin | 9,600 | 2,400 | 12,000 |
| 35 | Globulin | 4,800 | 1,200 | 6,000 |
| 36 | Bilirubin Direct | 9,600 | 2,400 | 12,000 |
| 37 | Bilirubin Indirect | 4,800 | 1,200 | 6,000 |
| 38 | Kalium | 13,600 | 3,400 | 17,000 |
| 39 | Natrium | 13,600 | 3,400 | 17,000 |
| 40 | Chlorida | 13,600 | 3,400 | 17,000 |
| 41 | Calsium | 13,600 | 3,400 | 17,000 |
| 42 | HIV | 12,000 | 3,000 | 15,000 |
| | | | | |
| 2. URINE | | | | |
| 1 | Urine Lengkap | 11,200 | 2,800 | 14,000 |
| 2 | Urine Rutin | 9,600 | 2,400 | 12,000 |
| 3 | Reduksi | 2,400 | 600 | 3,000 |
| 4 | Eiwit (Protein) | 2,400 | 600 | 3,000 |
| 5 | Test Kehamilan | 9,600 | 2,400 | 12,000 |
| 6 | Bilirubin | 3,200 | 800 | 4,000 |
| 7 | Sedimen | 4,800 | 1,200 | 6,000 |
| | | | | |
| 3. FAECES | | | | |
| 1 | Faeces Rutin | 5,600 | 1,400 | 7,000 |
| 2 | Telur Cacing | 2,400 | 600 | 3,000 |
| 3 | Darah Samar | 2,400 | 600 | 3,000 |
| | | | | |
| 4. PRAPARAT APUS / MIKROBIOLOGI | | | | |
| 1 | Sypillis | 8,000 | 2,000 | 10,000 |
| 2 | GO | 8,000 | 2,000 | 10,000 |

| | | | | |
|---|----------------------------------|--------|-------|--------|
| 3 | Diptheri Baksil | 8,000 | 2,000 | 10,000 |
| 4 | BTA / TBC | 5,600 | 1,400 | 7,000 |
| 5 | Pap Smear | 21,600 | 5,400 | 27,000 |
| 5. PEMERIKSAAN MAKANAN DAN MINUMAN | | | | |
| 1 | MPN Coliform | 16,800 | 4,200 | 21,000 |
| 2 | Angka Kuman | 16,800 | 4,200 | 21,000 |
| 3 | Logam Mercuri (Hg) | 10,400 | 2,600 | 13,000 |
| 4 | Logam Arsen (As) | 10,400 | 2,600 | 13,000 |
| 5 | Sianida (Cn) | 10,400 | 2,600 | 13,000 |
| 6 | Nitrit (NO 2) | 12,000 | 3,000 | 15,000 |
| 7 | Borax | 10,400 | 2,600 | 13,000 |
| 8 | Formaldehid | 10,400 | 2,600 | 13,000 |
| 9 | Metanol | 10,400 | 2,600 | 13,000 |
| 10 | Rhodamin B | 9,600 | 2,400 | 12,000 |
| 11 | Methanil Yellow | 9,600 | 2,400 | 12,000 |
| 12 | Auramin | 9,600 | 2,400 | 12,000 |
| 13 | Sakarin | 16,000 | 4,000 | 20,000 |
| 14 | Siklamat | 16,000 | 4,000 | 20,000 |
| 15 | Vibrio Cholera | 24,000 | 6,000 | 30,000 |
| 16 | Staphylococcus Aureus | 24,000 | 6,000 | 30,000 |
| 17 | Streptococcus | 24,000 | 6,000 | 30,000 |
| 18 | Salmonella | 24,000 | 6,000 | 30,000 |
| 19 | Shigella | 24,000 | 6,000 | 30,000 |
| 20 | E. Coli | 24,000 | 6,000 | 30,000 |
| 6. PEMERIKSAAN MPN COLIFORM AIR | | | | |
| 1 | Air Bersih | 14,400 | 3,600 | 18,000 |
| 2 | Air Minum | 16,800 | 4,200 | 21,000 |
| 3 | Air Badan Air | 18,400 | 4,600 | 23,000 |
| 7. PEMERIKSAAN AIR KOLAM RENANG | | | | |
| 1 | Air Kolam Renang | 30,400 | 7,600 | 38,000 |
| 8. PEMERIKSAAN KIMIA AIR | | | | |
| 1 | PH (Derajat Keasaman) | 7,200 | 1,800 | 9,000 |
| 2 | Fe (Kadar Besi) | 12,000 | 3,000 | 15,000 |
| 3 | Mn (Kadar Mangan) | 12,000 | 3,000 | 15,000 |
| 4 | Cl (Kadar Khlor) | 12,000 | 3,000 | 15,000 |
| 5 | Posphat | 12,000 | 3,000 | 15,000 |
| 6 | Aluminium (Al) | 11,200 | 2,800 | 14,000 |
| 7 | Kesadahan (CaCO ₃) | 6,400 | 1,600 | 8,000 |
| 8 | Khlorida (Cl) | 10,400 | 2,600 | 13,000 |
| 9 | Seng (Zn) | 10,400 | 2,600 | 13,000 |
| 10 | Sulfat (SO ₄) | 8,800 | 2,200 | 11,000 |
| 11 | Tembaga | 8,800 | 2,200 | 11,000 |
| 12 | Sisa Khlor (Cl ₂) | 6,400 | 1,600 | 8,000 |
| 13 | Amonia (NH ₃) | 5,600 | 1,400 | 7,000 |
| 14 | Zat Organik (KMnO ₄) | 8,800 | 2,200 | 11,000 |
| 9. PEMERIKSAAN KIMIA DAN ORGANIK AIR | | | | |
| 1 | Arsen (As) | 8,800 | 2,200 | 11,000 |
| 2 | Fluorida (F) | 8,800 | 2,200 | 11,000 |
| 3 | Kromium (Cr) | 8,800 | 2,200 | 11,000 |
| 4 | Kadmium (Cd) | 8,800 | 2,200 | 11,000 |

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|-------|--------|
| 5 | Nitrit (NO ₂) | 9,600 | 2,400 | 12,000 |
| 6 | Nitrat (NO ₃) | 8,800 | 2,200 | 11,000 |
| 7 | Sianida (Sn) | 10,400 | 2,600 | 13,000 |
| 8 | Selenium (Se) | 8,800 | 2,200 | 11,000 |
| 10. PEMERIKSAAN FISIKA AIR | | | | |
| 1 | Bau | 2,400 | 600 | 3,000 |
| 2 | Warna | 2,400 | 600 | 3,000 |
| 3 | Rasa | 1,600 | 400 | 2,000 |
| 4 | Suhu | 2,400 | 600 | 3,000 |
| 5 | Kekeruhan | 3,200 | 800 | 4,000 |
| 6 | Zat Padat Terlarut (TDS) | 4,000 | 1,000 | 5,000 |
| 11. PEMERIKSAAN AIR LIMBAH | | | | |
| 1 | B O D | 18,400 | 4,600 | 23,000 |
| 2 | C O D | 18,400 | 4,600 | 23,000 |
| 3 | T S S | 13,600 | 3,400 | 17,000 |
| 4 | DO (Dissolved Oxygen) | 12,000 | 3,000 | 15,000 |

B. PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK LAINNYA

| NO | KATEGORI PELAYANAN | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JUMLAH |
|----|-------------------------------|-------------|----------------|--------|
| 1 | Pemeriksaan USG dan Pembacaan | 35,000 | 15,000 | 50,000 |
| 2 | Pemeriksaan EKG dan Pembacaan | 17,500 | 7,500 | 25,000 |
| 3 | Pemakaian Nebulizer | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 4 | Pemeriksaan Mikro CO | 6,000 | 1,500 | 7,500 |
| 5 | Pemeriksaan Spirometri | 5,000 | 2,500 | 7,500 |
| 6 | Pemeriksaan IMT | 6,000 | 1,500 | 7,500 |

VII. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

| NO | KATEGORI PELAYANAN | JASA SARANA, OBAT, DAN BMHP | JASA PELAYANAN | JUMLAH |
|----|--------------------------|-----------------------------|----------------|--------|
| 1 | Pelayanan Fisioterapi | 9,000 | 6,000 | 15,000 |
| 2 | Pelayanan Okupasi Terapi | 9,000 | 6,000 | 15,000 |
| 3 | Pelayanan Terapi Wicara | 9,000 | 6,000 | 15,000 |

VIII. PELAYANAN TRANSPORTASI RUJUKAN

| Tempat Tujuan | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | | Jumlah |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| | | Sopir | Paramedis | |
| Dalam Kota | 15,000 | 6,000 | 9,000 | 30,000 |
| Luar Kota | (Jarak tempuh PP : 8) x Harga BBM/lt | 1/3 X jasa sarana | 1,25 X jasa sopir | |

Contoh :

Solo - Semarang PP = $\frac{220 \text{ km}}{8} \times \text{Rp } 4.500,- = 123.750$

Sopir = $0.75 \times 123.750 = 92.812,5$ (dibulatkan menjadi 93.000)

Paramedis = $1,25 \times 123.750 = 154.687,5$ (dibulatkan menjadi 155.000)

**TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA
(UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN)
DINAS PERTANIAN KOTA SURAKARTA**

TARIF RAWAT JALAN (PER KUNJUNGAN)

| No | Kategori Pelayanan | Pendaftaran | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Jumlah |
|----|--------------------|-------------|--------------|----------------|--------------|
| 1 | Pemeriksaan Medis | 0 | Rp. 15.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 25.000,- |

Catatan : Tarif tersebut belum termasuk harga vaksin

TARIF PELAYANAN VAKSINASI

| No | Kategori Pelayanan | Pendaftaran | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Jumlah |
|----|--------------------|-------------|--------------|----------------|--------------|
| 1 | Pemeriksaan Medis | 0 | Rp. 15.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 25.000,- |

Catatan : Tarif tersebut belum termasuk harga vaksin

TARIF RAWAT INAP PER HARI

| No | Jenis Hewan | Jasa Sarana | Pemberian Pakan | Jasa Pelayanan Dokter Hewan | Tenaga Kebersihan | Jumlah |
|----|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Rawat Inap | | | | | |
| | Kucing | Rp. 5.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 5.000,- | Rp. 30.000,- |
| | Anjing Kelompok Besar | Rp. 5.000,- | Rp. 20.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 5.000,- | Rp. 40.000,- |
| | Anjing Kelompok Kecil | Rp. 5.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 5.000,- | Rp. 30.000,- |
| | Unggas | Rp. 5.000,- | Rp. 2.500,- | Rp. 10.000,- | Rp. 2.500,- | Rp. 20.000,- |
| 2 | Kelinci | Rp. 5.000,- | Rp. 2.500,- | Rp. 10.000,- | Rp. 2.500,- | Rp. 20.000,- |
| | Penitipan | | | | | |
| | Kucing | Rp. 5.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 5.000,- | Rp. 5.000,- | Rp. 25.000,- |
| | Anjing Kelompok Besar | Rp. 5.000,- | Rp. 20.000,- | Rp. 5.000,- | Rp. 5.000,- | Rp. 35.000,- |
| | Anjing Kelompok Kecil | Rp. 5.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 5.000,- | Rp. 5.000,- | Rp. 25.000,- |
| | Unggas | Rp. 5.000,- | Rp. 2.500,- | Rp. 5.000,- | Rp. 2.500,- | Rp. 15.000,- |
| | Kelinci | Rp. 5.000,- | Rp. 2.500,- | Rp. 5.000,- | Rp. 2.500,- | Rp. 15.000,- |

TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

| No | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Jumlah |
|----|--------------|----------------|--------------|
| 1 | Rp. 20.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 30.000,- |

- Pengambilan jahitan
- Menutup luka
- Pungsi
- Infus pump
- Declaw
- Pengambilan benda asing di telinga, hidung dan tenggorokan tanpa pembiusan umum
- Reposisi prolaps ani ringan
- Vena Seksi
- Cateterisasi

TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF SEDERHANA (KECIL)

| No | Jenis Hewan | Jasa Sarana | Operator | Jasa Pelayanan Asisten Operator I | Jasa Pelayanan Asisten Operator II | Anastesi | Jumlah |
|----|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | Kucing | Rp. 15.000,- | Rp. 20.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 65.000,- |
| 2 | Anjing Kel. Besar | Rp. 20.000,- | Rp. 20.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 70.000,- |
| 3 | Anjing Kel. Kecil | Rp. 15.000,- | Rp. 20.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 65.000,- |
| 4 | Kelinci | Rp. 10.000,- | Rp. 15.000,- | Rp. 5.000,- | Rp. 5.000,- | Rp. 5.000,- | Rp. 40.000,- |
| 5 | Unggas | Rp. 5.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 5.000,- | Rp. 5.000,- | Rp. 5.000,- | Rp. 30.000,- |

Jenis Tindakan Medis Operatif Sederhana (Kecil)

- Prolaps Ani
- Incisi/Fiksasi luar dan dalam
- Cystotomi
- Abses
- Bumble Foot
- Menjahit luka
- Statis Ingluvies
- Kebiri

TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF SEDANG

| No | Jenis Hewan | Jasa Sarana | Operator | Jasa Pelayanan Asisten Operator I | Jasa Pelayanan Asisten Operator II | Anastesi | Jumlah |
|----|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| 1 | Kucing | Rp. 25.000,- | Rp. 50.000,- | Rp. 15.000,- | Rp. 15.000,- | Rp. 15.000,- | Rp. 120.000,- |
| 2 | Anjing Kel. Besar | Rp. 30.000,- | Rp. 50.000,- | Rp. 15.000,- | Rp. 15.000,- | Rp. 15.000,- | Rp. 125.000,- |
| 3 | Anjing Kel. Kecil | Rp. 25.000,- | Rp. 50.000,- | Rp. 15.000,- | Rp. 15.000,- | Rp. 15.000,- | Rp. 120.000,- |
| 4 | Kelinci | Rp. 20.000,- | Rp. 40.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 90.000,- |

Jenis Tindakan Medis Operatif Sedang

- Biopsi Carcinoma
- Othematom
- Potong ekor
- Enteropion
- Ovariektomi
- Potong Telinga
- Hernia Imbilicalis
- Kelenjar Hender
- Panhisterektomi
- Cysta Uteri
- Ekteropion

TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF BESAR

| No | Jenis Hewan | Jasa Sarana | Operator | Jasa Pelayanan Asisten Operator I | Jasa Pelayanan Asisten Operator II | Anastesi | Jumlah |
|----|--|---------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| 1 | Kucing | Rp. 75.000,- | Rp. 80.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 245.000,- |
| 2 | Anjing Kel. Besar | Rp. 100.000,- | Rp. 80.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 270.000,- |
| 3 | Anjing Kel. Kecil | Rp. 75.000,- | Rp. 80.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 245.000,- |
| 4 | Kelinci | Rp. 50.000,- | Rp. 50.000,- | Rp. 20.000,- | Rp. 20.000,- | Rp. 20.000,- | Rp. 160.000,- |
| 5 | Khusus Sectio Caesarea Anak Hidup per ekor | Rp. 20.000,- | | | | | |

Jenis Tindakan Medis Operatif Besar

- Fraktur
- Sectio Caesarea
- Laparotomi
- Biopsi jaringan tumor berat

TARIF PERSALINAN NORMAL

| No | Jenis Hewan | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Jumlah |
|----|--------------|--------------|----------------|------------|
| 1 | Kucing | Rp. 30.000,- | Rp. 40.000,- | Rp. 70.000 |
| 2 | Anjing Besar | Rp. 30.000,- | Rp. 40.000,- | Rp. 70.000 |
| 3 | Anjing Kecil | Rp. 30.000,- | Rp. 40.000,- | Rp. 70.000 |

Anak hidup /ekor = Rp. 20.000,-

TARIF PELAYANAN OKSIGEN (O₂)

Pemakaian per jam = Rp. 100,- x ltr (dosis) x 60 menit

TARIF USG

| NO | Kategori Pelayanan | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Jumlah |
|----|-----------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 1 | Pemeriksaan USG + Pembacaan | Rp. 15.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 25.000,- |

TARIF PELAYANAN GROOMING

| NO | Kategori Pelayanan | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Jumlah |
|----|------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 1 | Kucing | Rp. 15.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 25.000,- |
| 2 | Anjing Kelompok Besar Bulu Pendek | Rp. 17.500,- | Rp. 12.500,- | Rp. 30.000,- |
| 3 | Anjing Kelompok Besar Bulu Panjang | Rp. 20.000,- | Rp. 15.000,- | Rp. 35.000,- |
| 4 | Anjing Kelompok Kecil Bulu Pendek | Rp. 15.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 25.000,- |
| 5 | Anjing Kelompok Kecil Bulu Panjang | Rp. 17.500,- | Rp. 12.500,- | Rp. 30.000,- |
| 6 | Kelinci | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 20.000,- |

TARIF PELAYANAN GROOMING KESEHATAN

| NO | Kategori Pelayanan | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Jumlah |
|----|------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 1 | Kucing | Rp. 20.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 30.000,- |
| 2 | Anjing Kelompok Besar Bulu Pendek | Rp. 22.500,- | Rp. 12.500,- | Rp. 35.000,- |
| 3 | Anjing Kelompok Besar Bulu Panjang | Rp. 25.000,- | Rp. 15.000,- | Rp. 40.000,- |
| 4 | Anjing Kelompok Kecil Bulu Pendek | Rp. 20.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 30.000,- |
| 5 | Anjing Kelompok Kecil Bulu Panjang | Rp. 22.500,- | Rp. 12.500,- | Rp. 35.000,- |
| 6 | Kelinci | Rp. 15.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 25.000,- |

TARIF LAYANAN INSEMINASI BUATAN

| NO | Kategori Pelayanan | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Jumlah |
|----|---|-------------|----------------|------------|
| 1 | Layanan Inseminasi Buatan (Kawin Suntik) | Rp. 20.000 | Rp.20.000 | Rp. 40.000 |

TARIF PELAYANAN FOTO RONGENT

| NO | Kategori Pelayanan | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Jumlah |
|----|--------------------------|-------------|----------------|--------------|
| 1 | Foto Rongent + Pembacaan | Rp. 70.000 | Rp. 20.000,- | Rp. 90.000,- |

TARIF PELAYANAN AMBULATOIR DALAM KOTA

| NO | Kategori Pelayanan | Pendaftaran | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Transportasi | Jumlah |
|----|--------------------|-------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 1 | Pemeriksaan Medis | 0 | Rp. 15.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 35.000,- |

TARIF PELAYANAN AMBULATOIR LUAR KOTA (Radius 30 km)

| NO | Kategori Pelayanan | Pendaftaran | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Transportasi | Jumlah |
|----|--------------------|-------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 1 | Pemeriksaan Medis | 0 | Rp. 15.000,- | Rp. 10.000,- | Rp. 15.000,- | Rp. 40.000,- |

TARIF TRANSPORTASI ANTAR JEMPUT HEWAN

| No | Tempat Tujuan | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | | Jumlah |
|----|---------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | Sopir | Paramedis | |
| 1 | Dalam Kota | Rp. 15.000,- | Rp. 6.000,- | Rp. 9.000,- | Rp. 30.000,- |
| 2 | Luar Kota | (Jarak Tempuh PP : 8) x Harga BBM /H | 1/3 x Jasa Sarana | 1.25 x Jasa Sopir | |

TARIF PELAYANAN LABORATORIUM
A. HEMATOLOGI + KIMIA DARAH

| NO | Kategori Pelayanan | Jasa Sarana, Reagen dan BMHP | Jasa Pelayanan | Jumlah |
|----|----------------------|------------------------------|----------------|--------------|
| 1 | Darah Rutin | Rp. 9.600,- | Rp. 2.400,- | Rp. 12.000,- |
| 2 | Darah Lengkap | Rp. 13.600,- | Rp. 3.400,- | Rp. 17.000,- |
| 3 | Golongan Darah | Rp. 3.200,- | Rp. 800,- | Rp. 4.000,- |
| 4 | Hemoglobin | Rp. 2.400,- | Rp. 600,- | Rp. 3.000,- |
| 5 | Angka Leukosit (AL) | Rp. 3.200,- | Rp. 800,- | Rp. 4.000,- |
| 6 | Angka Trombosit (AE) | Rp. 3.200,- | Rp. 800,- | Rp. 4.000,- |
| 7 | Angka Trombosit (AT) | Rp. 3.200,- | Rp. 800,- | Rp. 4.000,- |
| 8 | Waktu Pendarahan | Rp. 2.400,- | Rp. 600,- | Rp. 3.000,- |
| 9 | Waktu Pembekuan | Rp. 2.400,- | Rp. 600,- | Rp. 3.000,- |
| 10 | Hematocrit (HCT) | Rp. 3.200,- | Rp. 800,- | Rp. 4.000,- |
| 11 | Malaria | Rp. 4.200,- | Rp. 600,- | Rp. 3.000,- |
| 12 | MCV | Rp. 4.800,- | Rp. 1.200,- | Rp. 6.000,- |
| 13 | MCH | Rp. 4.800,- | Rp. 1.200,- | Rp. 6.000,- |
| 14 | MCHC | Rp. 4.800,- | Rp. 1.200,- | Rp. 6.000,- |
| 15 | Bilirubin | Rp. 9.600,- | Rp. 2.400,- | Rp. 12.000,- |
| 16 | SGOT | Rp. 9.600,- | Rp. 2.400,- | Rp. 12.000,- |
| 17 | SGPT | Rp. 9.600,- | Rp. 2.400,- | Rp. 12.000,- |
| 18 | Ureum | Rp. 9.600,- | Rp. 2.400,- | Rp. 12.000,- |
| 19 | Creatinim | Rp. 9.600,- | Rp. 2.400,- | Rp. 12.000,- |
| 20 | Cholesterol | Rp. 9.600,- | Rp. 2.400,- | Rp. 12.000,- |
| 21 | HDL Cholesterol | Rp. 11.200,- | Rp. 2.800,- | Rp. 14.000,- |
| 22 | LDL Cholesterol | Rp. 7.200,- | Rp. 1.800,- | Rp. 9.000,- |
| 23 | Tryglyserid | Rp. 11.200,- | Rp. 2.800,- | Rp. 14.000,- |
| 24 | Asam Urat | Rp. 11.200,- | Rp. 2.800,- | Rp. 14.000,- |
| 25 | Glukosa Sewaktu | Rp. 9.600,- | Rp. 2.400,- | Rp. 12.000,- |

| | | | | |
|----|-----------------------|--------------|-------------|--------------|
| 26 | Glukosa Puasa | Rp. 9.600,- | Rp. 2.400,- | Rp. 12.000,- |
| 27 | Hitung Jenis Leukosit | Rp. 5.600,- | Rp. 1.400,- | Rp. 7.000,- |
| 28 | Protein Total | Rp. 9.600,- | Rp. 2.400,- | Rp. 12.000,- |
| 29 | Albumin | Rp. 9.600,- | Rp. 2.400,- | Rp. 12.000,- |
| 30 | Globulin | Rp. 4.800,- | Rp. 1.200,- | Rp. 6.000,- |
| 31 | Bilirubin Direct | Rp. 9.600,- | Rp. 2.400,- | Rp. 12.000,- |
| 32 | Bilirubin Indirect | Rp. 4.800,- | Rp. 1.200,- | Rp. 6.000,- |
| 33 | Kalium | Rp. 13.600,- | Rp. 3.400,- | Rp. 17.000,- |
| 34 | Natrium | Rp. 13.600,- | Rp. 3.400,- | Rp. 17.000,- |
| 35 | Chlorida | Rp. 13.600,- | Rp. 3.400,- | Rp. 17.000,- |
| 36 | Calsium | Rp. 13.000,- | Rp. 3.400,- | Rp. 17.000,- |

B. HA-HI TEST

| NO | Kategori Pelayanan | Jasa Sarana, Reagen dan BMHP | Jasa Pelayanan | Jumlah |
|----|----------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | Pelayanan Pemeriksaan HA-HI Test | Rp. 3.000,- | Rp. 2.000,- | Rp. 5.000,- |

C. ELISA

| NO | Kategori Pelayanan | Jasa Sarana, Reagen dan BMHP | Jasa Pelayanan | Jumlah |
|----|---|------------------------------|----------------|---------------|
| 1 | Pelayanan Pemeriksaan Elisa + Pembacaan | Rp. 300.000,- | Rp. 50.000,- | Rp. 350.000,- |

D. PEMERIKSAAN DAGING DAN SUSU

| NO | Kategori Pelayanan | Jasa Sarana, Reagen dan BMHP | Jasa Pelayanan | Jumlah |
|----|----------------------------|------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | Pemeriksaan Organoleptik | Rp. 500,- | Rp. 500,- | Rp. 1.000,- |
| 2 | Pemeriksaan Awal Kebusukan | Rp. 2.000,- | Rp. 500,- | Rp. 2.500,- |
| 3 | Pemeriksaan Formalin | Rp. 2.000,- | Rp. 500,- | Rp. 2.500,- |
| 4 | Pemeriksaan Susu Rutin | Rp. 4.000,- | Rp. 1.000,- | Rp. 5.000,- |

TARIF ATAS PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN YANG AKAN DIKIRIM KE LUAR DAERAH UNTUK PERDAGANGAN (PER EKOR)

1. Hewan Hobi

| No | Jenis Pelayanan | Besar Tarif /ekor | Keterangan |
|----|-----------------|-------------------|------------------------------|
| 1 | Hewan Besar | Rp. 20.000,- | Kuda |
| 2 | Hewan Kecil | Rp. 10.000,- | Anjing, Kucing, Kelinci, dll |
| 3 | Unggas | Rp. 10.000,- | Burung, Ayam, dll |
| 4 | Ikan | Rp. 10.000,- | Arwana, Koi, Lou Han, dll |

2. Hewan Konsumsi

| No | Jenis Pelayanan | Besar Tarif /ekor | Keterangan |
|----|-----------------|-------------------|--------------------------------------|
| 1 | Hewan Besar | Rp. 5.000,- | Sapi, Kerbau |
| 2 | Hewan Kecil | Rp. 750,- | Kambing, Domba, Babi |
| 3 | Unggas | Rp. 25,- | Ayam, Burung Puyuh, Itik, Entok, dll |
| 4 | Ikan | Rp. 25,- | Nila, Gurami, Lele, dll |

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011**

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

| NO | JENIS | DASAR PUNGUTAN | KLAS | | | |
|------|--|----------------|---------|---------|---------|--------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | RUMAH TANGGA | | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 |
| II. | INDUSTRI | | | | | |
| 1. | Pabrik | | 300.000 | 150.000 | 110.000 | 75.000 |
| 2. | Home Industri | | 15.000 | 15.000 | 7.500 | 7.500 |
| III. | PERUSAHAAN JASA | | | | | |
| 1. | PENGINAPAN | | | | | |
| a. | Hotel Bintang | | 300.000 | 150.000 | 110.000 | 75.000 |
| b. | Hotel Melati | | 75.000 | 50.000 | 15.000 | 7.500 |
| c. | Home Stay, Penginapan Remaja, Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan | | 15.000 | 15.000 | 7.500 | 7.500 |
| 2. | RUMAH MAKAN | | | | | |
| a. | Restoran Talam Kencana (A) | | 300.000 | 150.000 | 110.000 | 75.000 |
| b. | Talam Selaka (B), Talam Gangsa (C) | | 200.000 | 100.000 | 75.000 | 50.000 |
| | Non Talam (D), (E) | | 75.000 | 50.000 | 15.000 | 7.500 |
| c. | Warung, Bar, Kedai Makanan dan Minuman, Penjual Makanan Keliling/PKL, Jasa Boga/Katering | | 15.000 | 15.000 | 7.500 | 7.500 |
| 3. | GEDUNG PERTEMUAN | | 60.000 | 50.000 | 30.000 | 20.000 |
| 4. | TEMPAT HIBURAN | | | | | |
| a. | Kelas Besar | | 150.000 | 100.000 | 75.000 | 50.000 |
| b. | Kelas Menengah | | 75.000 | 50.000 | 30.000 | 20.000 |
| c. | Kelas Kecil | | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5. | SALON/ PENJAHIT/BENGKEL | | | | | |
| | Pangkas rambut, Salon Kecantikan, Tailor, dsb. | | | | | |
| a. | Besar | | 50.000 | 40.000 | 30.000 | 20.000 |
| b. | Kecil | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6. | ANGKUTAN/TRAVEL | | | | | |
| | Angkutan Jalan, Wisata, Taksi, Sewa, Trayek, dan Udara | | 40.000 | 30.000 | 20.000 | 10.000 |
| 7. | FINANSIAL/KEUANGAN | | 225.000 | 150.000 | 75.000 | 45.000 |
| 8. | JASA UMUM | | | | | |
| | Perbengkelan, Servis, Persewaan Barang, Jasa Konstruksi, dsb | | 60.000 | 40.000 | 20.000 | 10.000 |
| 9. | PERGUDANGAN | | | | | |
| | Pergudangan, Cold Storage, Warehousing, dsb. | | 60.000 | 40.000 | 20.000 | 10.000 |
| 10. | JASA PROFESI | | | | | |
| | Dokter, Dokter Hewan, Konsultan, Pengacara, Notaris, dsb. | | 30.000 | 15.000 | 10.000 | 5.000 |
| IV. | PERDAGANGAN | | | | | |
| | Pertokoan, Perkiosan, Perkantoran, dsb. | | | | | |
| 1. | Kelas Besar | | 300.000 | 150.000 | 110.000 | 75.000 |
| 2. | Kelas Menengah | | 100.000 | 75.000 | 50.000 | 10.000 |
| 3. | Kelas Kecil | | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| V. | FASILITAS UMUM | | 150.000 | 100.000 | 75.000 | 30.000 |

| | | | | | | |
|-----|---|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | KESEHATAN | | | | | |
| a | Rumah Sakit, | | | | | |
| b | Balai Pengobatan, Klinik, Pelayanan Kesehatan Hewan, Kegiatan Panti Sosial/Jompo, dsb | | | | | |
| 2. | PENDIDIKAN | | | | | |
| | Sekolah, Pondok Pesantren, LPK, dsb. | | | | | |
| 3. | SOSIAL | | | | | |
| | Taman Wisata, Terminal, dsb. | | | | | |
| 4. | BUDAYA | | | | | |
| | Keraton, Museum, Sejarah, dsb | | | | | |
| 5. | EKONOMI | | | | | |
| | Pasar Tradisional | | | | | |
| | Kios/Los | Per m2/hari | | 30 | 15 | 10 |
| | Plataran Dalam pasar | Per pedagang/ hari | | 50 | 15 | 50 |
| | Plataran Luar pasar | | | 50 | 50 | 50 |
| VI. | USAHA JASA DAN PERUSAHAAN LAINNYA | | 30.000 | 25.000 | 20.000 | 10.000 |
| | | | | | | |
| X. | INSIDENTAL | | | | | |
| 1. | Kegiatan Hiburan, Kegiatan Olah Raga dan Kegiatan Keramaian yang lainnya. | | 300.000 | 250.000 | 200.000 | 150.000 |

TABEL PENENTUAN KLAS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN PADA SEKTOR USAHA

| NO | JAM KERJA | SKOR |
|----|-----------|---------|
| 1 | 1 – 6 | 1 |
| 2 | 7 – 12 | 2 |
| 3 | 13 – 18 | 3 |
| 4 | 19 – 24 | 4 (MAX) |

| NO | TENAGA KERJA | SKOR |
|----|--------------|---------|
| 1 | 1 – 5 | 1 |
| 2 | 6 – 10 | 2 |
| 3 | 10 – 15 | 3 |
| 4 | > 15 | 4 (MAX) |

| NO | JUMLAH SKOR | SKOR |
|----|-------------|------|
| 1 | 7 – 8 | 1 |
| 2 | 5 – 6 | 2 |
| 3 | 3 – 4 | 3 |
| 4 | 1 – 2 | 4 |

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011**

**TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

| NO. | JENIS PELAYANAN | WNI | WNA |
|-----|--|---------|---------|
| 1. | Kartu Tanda Penduduk (KTP) | 5.000 | 75.000 |
| 2. | Kartu Keterangan Bertempat Tinggal | - | 100.000 |
| 3. | Kartu Identitas Penduduk Musiman | 10.000 | - |
| 4. | Kartu Keluarga (KK) | 5.000 | 100.000 |
| 5. | Akta catatan sipil | | |
| | a. Akta Kelahiran | - | - |
| | b. Akta Perkawinan | | |
| | - Di Kantor | 100.000 | 150.000 |
| | - Di Luar Kantor | 125.000 | 175.000 |
| | c. Akta Perceraian | 150.000 | 250.000 |
| | d. Akta Pengakuan Anak | 60.000 | 100.000 |
| | e. Akta Pengesahan Anak | 100.000 | 150.000 |
| | f. Akta Ganti Nama | 50.000 | 100.000 |
| | g. Akta Kematian | 20.000 | 50.000 |
| | Khusus pemegang PKMS Kartu Gold dibebaskan. | | |
| 6. | Kutipan ke-2 dst/Salinan Akta | | |
| | a. Akta Kelahiran | 25.000 | 50.000 |
| | b. Akta Perkawinan | 50.000 | 100.000 |
| | c. Akta Perceraian | 75.000 | 100.000 |
| | d. Akta Pengakuan Anak | 50.000 | 100.000 |
| | e. Akta Pengesahan Anak | - | - |
| | f. Akta Kematian | 50.000 | 100.000 |

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN

| No | Jenis | Tarif |
|-----------|-----------------------------------|---|
| 1. | Untuk orang dewasa | |
| | a. untuk kuburan umum | 150.000 |
| | b. untuk kuburan khusus | 500.000 |
| 2. | Untuk anak-anak di bawah 10 tahun | 50 % (lima puluh persen) dari tarif (1) |

Keterangan : Khusus pemegang PKMS gold dan JAMKESMAS dibebaskan dari kewajiban retribusi.

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

| No. | Zona | Jenis Kendaraan | Tarif Sekali Parkir | Keterangan |
|-----|--------|-------------------------|---------------------|--|
| 1. | Zona A | Sepeda | 500 | Satu kali parkir maksimum 1 (satu) jam, tiap satu jam kelebihan dikenakan tarif tambahan sebesar 100 % dari besarnya retribusi yang ditetapkan. Kelebihan jam parkir kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam. |
| | | Andong/Dokar | 500 | |
| | | Sepeda Motor | 3000 | |
| | | Mobil Penumpang/Pick Up | 5.000 | |
| | | Bus Sedang/Truck Sedang | 8.000 | |
| | | Bus Besar/Truck Besar | 10.000 | |
| 2. | Zona B | Sepeda | 500 | |
| | | Andong/Dokar | 500 | |
| | | Sepeda Motor | 2500 | |
| | | Mobil Penumpang/Pick Up | 4000 | |
| | | Bus Sedang/Truck Sedang | 6500 | |
| | | Bus Besar/Truck Besar | 8500 | |
| 3. | Zona C | Sepeda | 500 | |
| | | Andong/Dokar | 500 | |
| | | Sepeda Motor | 2000 | |
| | | Mobil Penumpang/Pick Up | 3000 | |
| | | Bus Sedang/Truck Sedang | 5000 | |
| | | Bus Besar/Truck Besar | 7000 | |
| 4. | Zona D | Sepeda | 500 | |
| | | Andong/Dokar | 500 | |
| | | Sepeda Motor | 1.500 | |
| | | Mobil Penumpang/Pick Up | 2.000 | |
| | | Bus Sedang/Truck Sedang | 3500 | |
| | | Bus Besar/Truck Besar | 5500 | |

| | | | | |
|----|--------|-------------------------|------|--|
| 5. | Zona E | Sepeda | 500 | |
| | | Andong/Dokar | 500 | |
| | | Sepeda Motor | 1000 | |
| | | Mobil Penumpang/Pick Up | 1500 | |
| | | Bus Sedang/Truck Sedang | 3000 | |
| | | Bus Besar/Truck Besar | 4000 | |

Keterangan :

1. Besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum untuk Tahun 2012 maximal sampai zona c.
2. Peningkatan zona setelah Tahun 2012 dengan Peraturan Walikota.
3. Penentuan zona ditentukan dengan Peraturan Walikota.
4. Khusus untuk sekolah, tempat ibadah, rumah sakit (Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas) tidak dikenakan tarif progresif. (untuk penjemput dikenakan tarif progresif).

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

| No | Jenis Tempat | Besarnya Retribusi |
|-----------|---|---|
| 1. | Plataran Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 | 500,-/m2/hr 300,-/m2/hr 200,-/m2/hr |
| 2. | Los | 0,1 ‰ TNTD |
| 3. | Kios | 0,1 ‰ TNTD |

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

| No | Jenis Pelayanan | Tarif (Rp) | Keterangan |
|----|---|------------|--|
| 1 | Beaya Uji | | |
| | JBB 0 s/d 2100 | 30.000 | Termasuk kendaraan bermotor roda tiga yang digunakan untuk angkutan barang |
| | JBB 2.101 s/d 3.500 | 35.000 | |
| | JBB 3.501 s/d 8.000 | 40.000 | |
| | JBB 8.001 s/d 15.000 | 45.000 | |
| | JBB 15.000 ke atas | 50.000 | |
| | Gandengan | 45.000 | |
| | Tempelan | 45.000 | |
| 2 | Biaya penggantian buku uji rusak/ tidak terbaca (rutin dan penerbitan baru) | 10.000 | |
| 3 | Biaya penggantian buku uji hilang | 100.000 | |
| 4 | Plat Uji/ Tanda Lulus Uji | 5.000 | |
| 5 | Cat Samping | 5.000 | |

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011

TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

| NO. | JENIS PELAYANAN | TARIF | KETERANGAN |
|-----|---|--------|------------|
| I. | Pemeriksaan dan pemasangan label stiker pada alat pemadam api/ kebakaran untuk konsumen atau pemilik alat pemadam kebakaran, setiap tahun ditetapkan sebagai berikut: | | |
| 1. | Alat pemadam kebakaran yang berisi busa, super busa dan sejenisnya | | |
| | a. Sampai dengan 25 liter | 5000 | per unit |
| | b. lebih dari 25 liter s/d 50 liter | 10.000 | per unit |
| 2. | Alat pemadam kebakaran yang berisi gas, dry chemical powder, halon dan sejenisnya | | |
| | a. sampai dengan 6 kg | 5.000 | per unit |
| | b. lebih dari 6 kg s/d 20 kg | 10.000 | per unit |
| | c. lebih dari 20 kg s/d 150 kg | 20.000 | per unit |
| | b. lebih dari 150 kg | 40.000 | per unit |
| 3. | Alat pemadam kebakaran jenis Fire Protection (fire hydrant, sprinkler, dan lain-lain) | | |
| | a. fire hydrant | 15.000 | per titik |
| | b. fire alarm | 10.000 | per titik |
| | c. sprinkler | 5.000 | per titik |
| | d. smoke detector | 5.000 | per titik |
| II. | Penelitian gambar-gambar rencana dan pengentasan akhir pemasangan hydrant kebakaran sistem pemancar air kebakaran, setiap tahun ditetapkan sebagai berikut : | | |
| | a. hydrant dan house reel | 15.000 | per titik |
| | b. fire alarm | 10.000 | per titik |
| | c. sprinkle | 5.000 | per titik |
| | d. smoke detector | 5.000 | per titik |

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

**LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011**

TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

| NO. | JENIS PELAYANAN | TARIF (Rp.) | KETERANGAN |
|-----|--|--|--|
| 1. | Pengukuran | $Tu : (L/500 \times HSBku) +$ Rp. 100.000,- | |
| 2 | Cetak Peta | | |
| a. | hitam putih | | |
| | 1) format A4 | 25.000 | per lembar/per wilayah |
| | 2) format A3 | 40.000 | per lembar/per wilayah |
| | 3) format A2 | 55.000 | per lembar/per wilayah |
| | 4) format A1 | 75.000 | per lembar/per wilayah |
| | 5) format A0 | 100.000 | per lembar/per wilayah |
| b. | berwarna | | |
| | 1) format A4 | 75.000 | per lembar/per wilayah |
| | 2) format A3 | 90.000 | per lembar/per wilayah |
| | 3) format A2 | 110.000 | per lembar/per wilayah |
| | 4) format A1 | 135.000 | per lembar/per wilayah |
| | 5) format A0 | 175.000 | per lembar/per wilayah |
| 3. | Biaya Gambar | 300.000 | berdasarkan standarisasi indeks biaya kegiatan, pemeliharaan, pengadaan dan honorarium serta harga satuan bangunan tahun berjalan. |
| 4. | Administrasi (meliputi komputerisasi, penyimpanan peta, pemeliharaan peta) | 150.000 | berdasarkan standarisasi indeks biaya kegiatan, pemeliharaan, pengadaan dan honorarium serta harga satuan bangunan tahun berjalan. |

KETERANGAN :

1. HSBku : harga satuan biaya khusus kegiatan pengukuran yang berlaku untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dana honor yang terkait dengan keluaran (output kegiatan). HSBku untuk tahun berjalan.
Tu : tarif pelayanan pengukuran
L : luas tanah (dalam satuan m²)
2. Retribusi penggantian biaya cetak peta :
Pelayanan pengukuran + cetak peta + biaya gambar + biaya administrasi.

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

**LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011**

**TARIF RETRIBUSI
TERA/TERA ULANG ALAT ALAT UTTP, KALIBRASI ALAT UKUR SERTA
PENGUJIAN BDKT**

| NO | JENIS | SATUAN | BIAYA RETRIBUSI | | KET |
|----------|--|--------|-----------------|------------|-----|
| | | | TERA | TERA ULANG | |
| A | ALAT UTTP | | | | |
| 1 | UKURAN PANJANG | | | | |
| | a. Sampai dengan 2 meter | buah | 3.000,- | 4.000,- | |
| | b. Lebih dari 2 meter sampai dengan 10 meter | buah | 5.000,- | 8.000,- | |
| | c. Lebih 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan | buah | 5.000,- | 10.000,- | |
| | d. ukuran panjang jenis : | | | | |
| | 1. Salib ukur | buah | 10.000,- | 10.000,- | |
| | 2. Blok ukur | buah | 10.000,- | 10.000,- | |
| | 3. Mikrometer | buah | 10.000,- | 10.000,- | |
| | 4. Jangka sorong | buah | 10.000,- | 10.000,- | |
| | 5. Alat ukur tinggi orang | buah | 10.000,- | 10.000,- | |
| | 6. Counter meter | buah | 15.000,- | 15.000,- | |
| | 7. Roll tester | buah | 100.000,- | 100.000,- | |
| | 8. Komparator | buah | 100.000,- | 100.000,- | |
| | | | | | |
| 2 | ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) | | | | |
| | a. Mekanik | buah | 75.000,- | 150.000,- | |
| | b. Otomotif | buah | 150.000,- | 200.000,- | |
| | | | | | |
| 3 | TAKARAN (BASAH/ KERING) | | | | |
| | a. Sampai dengan 2 L | buah | 500,- | 500,- | |
| | b. Lebih dari 2 L sampai 25 L | buah | 1.000,- | 1.000,- | |
| | c. Lebih dari 25 L | buah | 5.000,- | 5.000,- | |
| | | | | | |
| 4 | TANGKI UKUR | | | | |
| | a. Bentuk Silinder Tegak | | | | |
| | 1. Sampai dengan 500 kL | buah | 150.000,- | 200.000,- | |
| | 2. Lebih dari 500 kL dihitung sbb : | | | | |
| | a. 500 kL pertama | buah | 150.000,- | 200.000,- | |
| | b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 10 kL | buah | 2.000,- | 3.000,- | |
| | c. Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap 10 kL | buah | 1.500,- | 2.000,- | |
| | d. Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap 10 kL | buah | 200,- | 300,- | |
| | e. Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap 10 kL | buah | 100,- | 200,- | |
| | f. Selebihnya dari 20.000 kL, setiap 10 kL Bagian-bagian dari 10 kL dihitung satu 10 kL | buah | 50,- | 1000,- | |
| | | | | | |
| | b. Bentuk Bola Dan Sferoidal | | | | |
| | 1. Sampai dengan 500 kL | buah | 300.000,- | 300.000,- | |
| | 2. Lebih dari 500 kL dihitung sbb : | | | | |
| | a. 500 kL pertama | buah | 300.000,- | 300.000,- | |
| | b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 10 kL | buah | 5.000,- | 5.000,- | |
| | c. Selebihnya dari 1.000 kL, setiap 10 kL | buah | 3.000,- | 3.000,- | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----|---|------|-----------|-----------|---|
| | c. Bentuk Silinder Datar | | | | |
| | 1. Sampai dengan 10 kL | buah | 300.000,- | 300.000,- | |
| | 2. Lebih dari 10 kL dihitung sbb : | | | | |
| | a. 10 kL pertama | buah | 300.000,- | 300.000,- | - |
| | b. Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL, setiap kL | buah | 3.000,- | 3.000,- | - |
| | c. Selebihnya dari 50 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL | buah | 2.000,- | 2.000,- | - |
| | | | | | |
| 5 | TANGKI UKUR GERAK | | | | |
| | a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon | | | | |
| | 1. Kapasitas sampai dengan 5 kL | buah | 100.000,- | 100.000,- | - |
| | 2. Lebih dari 5 kL dihitung sbb : | | | | |
| | a. 5 kL pertama | buah | 100.000,- | 100.000,- | - |
| | b. Selebihnya dari 5 kL, setiap kL Bagian dari kL dihitung satu kL | buah | 20.000,- | 20.000,- | - |
| | | | | | |
| 6 | ALAT UKUR DARI GELAS | | | | |
| | a. Labu ukur, Buret dan Pipet | buah | 20.000,- | | - |
| | b. Gelas ukur | buah | 15.000,- | | - |
| | | | | | |
| 7 | BEJANA UKUR | | | | |
| | a. Sampai dengan 50 L | buah | 50.000,- | 50.000,- | - |
| | b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L | | 75.000,- | 75.000,- | - |
| | c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L | buah | 100.000,- | 100.000,- | - |
| | d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L | buah | 125.000,- | 125.000,- | - |
| | e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1000 L | | 15.000,- | 15.000,- | - |
| | | | | | |
| 8 | METER TAKSI | buah | 50.000,- | 50.000,- | - |
| 9 | SPEEDOMETER | buah | 15.000,- | 15.000,- | - |
| 10 | METER REM | buah | 15.000,- | 15.000,- | - |
| 11 | TACHOMETER | buah | 50.000,- | 25.000,- | - |
| 12 | THERMOMETER | buah | 10.000,- | 10.000,- | - |
| 13 | TENSIMETER | buah | 10.000,- | 10.000,- | - |
| 14 | VISKOMETER | buah | 10.000,- | 10.000,- | - |
| 15 | ALAT UKUR LUAS | buah | 10.000,- | 25.000,- | - |
| 16 | ALAT UKUR SUDUT | buah | 25.000,- | 25.000,- | - |
| | | | | | |
| 17 | ALAT UKUR CAIRAN MINYAK | | | | |
| | a. Meter Bahan Bakar Minyak | | | | |
| | a.1. Meter Induk Untuk setiap media uji | | | | |
| | 1. Sampai dengan 25 m ³ /h | buah | 100.000,- | 100.000,- | |
| | 2. Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb: | | | | |
| | a. 25 m ³ /h pertama | buah | 100.000,- | 100.000,- | |
| | b. Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h | buah | 5.000,- | 5.000,- | |
| | c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h | buah | 3.000,- | 3.000,- | |
| | d. Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h | buah | 1.000,- | 1.000,- | |
| | a.2. Meter Kerja Untuk setiap jenis media uji | | | | |
| | 1. Sampai dengan 15 m ³ /h | buah | 50.000,- | 50.000,- | |
| | 2. Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb : | | | | |
| | a. 15 m ³ /h pertama | buah | 50.000,- | 50.000,- | |
| | b. Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h | buah | 3.000,- | 3.000,- | |
| | c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h | buah | 2.000,- | 2.000,- | |
| | d. Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h | buah | 1.000,- | 1.000,- | |
| | a.3. Pompa Ukur Untuk setiap badan ukur | buah | 50.000,- | 50.000,- | |

| | | | | | |
|----|--|------|-----------|-----------|---|
| 18 | ALAT UKUR GAS | | | | |
| | a. Meter Induk | | | | |
| | 1. Sampai dengan 100 m3/h | buah | 100.000,- | 100.000,- | |
| | 2. Lebih dari 100 m3/h dihitung sbb : | | | | |
| | a. 100 m3/h pertama | buah | 100.000,- | 100.000,- | |
| | b. Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap 10 m3/h | buah | 5.000,- | 5.000,- | |
| | c. Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1.000 m3/h, setiap 10 m3/h | buah | 3.000,- | 3.000,- | |
| | d. Selebihnya dari 1.000 m3/h sampai dengan 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h | buah | 1.000,- | 1.000,- | - |
| | e. Selebihnya dari 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h Bagian-bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h | buah | 500,- | 500,- | - |
| | b. Meter Kerja | | | | |
| | 1. Sampai dengan 50 m3/h | buah | 50.000,- | 50.000,- | - |
| | 2. Lebih dari 50 m3/h dihitung sbb: | | | | |
| | a. 50 m3/h pertama | buah | 50.000,- | 50.000,- | - |
| | b. Selebihnya dari 50 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap 10 m3/h | buah | 2.000,- | 2.000,- | - |
| | c. Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1.000 m3/h, setiap 10 m3/h | buah | 1.000,- | 1.000,- | - |
| | d. Selebihnya dari 1.000 m3/h sampai dengan 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h | buah | 500,- | 500,- | - |
| | e. Selebihnya dari 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h Bagian-bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h | buah | 200,- | 200,- | - |
| | c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu system / unit alat ukur) | buah | 250.000,- | 250.000,- | |
| | d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan | buah | 50.000,- | 50.000,- | |
| | e. Pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji untuk setiap badan ukur | buah | 50.000,- | 50.000,- | |
| 19 | METER AIR | | | | |
| | a. Meter Induk | | | | |
| | 1. Sampai dengan 15 m3/h | buah | 50.000,- | 100.000,- | |
| | 2. Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h | buah | 60.000,- | 150.000,- | |
| | 3. Lebih dari 100 m3/h | buah | 75.000,- | 200.000,- | |
| | b. Meter Kerja | | | | |
| | 1. Sampai dengan 10 m3/h | buah | 2.500,- | 5.000,- | |
| | 2. Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h | buah | 10.000,- | 10.000,- | |
| | 3. Lebih dari 100 m3/h | buah | 25.000,- | 50.000,- | |
| 20 | METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR | | | | |
| | a. Meter Induk | | | | |
| | 1. Sampai dengan 15 m3/h | buah | 100.000,- | 100.000,- | |
| | 2. Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h | buah | 150.000,- | 150.000,- | |
| | 3. Lebih dari 100 m3/h | buah | 200.000,- | 200.000,- | |
| | b. Meter Kerja | | | | |
| | 1. Sampai dengan 15 m3/h | buah | 5.000,- | 5.000,- | |
| | 2. Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h | buah | 15.000,- | 15.000,- | |
| | 3. Lebih dari 100 m3/h | buah | 50.000,- | 50.000,- | |
| 21 | ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC) TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA | buah | 30.000,- | 30.000,- | |
| 22 | METER PROVER | | | | |
| | a. Sampai dengan 2.000 L | buah | 200.000,- | 200.000,- | |
| | b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L | buah | 300.000,- | 300.000,- | |
| | c. Lebih dari 10.000 L | buah | 500.000,- | 500.000,- | |

| | | | | | |
|-----------|---|------|-----------|-----------|--|
| | Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur | | | | |
| 23 | METER ARUS MASSA | | | | |
| | Untuk setiap jenis media uji : | | | | |
| | a. Sampai dengan 10 kg/min | buah | 100.000,- | 100.000,- | |
| | b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb : | buah | | | |
| | 1. 10 kg/min pertama | buah | 100.000,- | 100.000,- | |
| | 2. Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min | buah | 2.000,- | 2.000,- | |
| | 3. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min | buah | 1.500,- | 1.500,- | |
| | 4. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min | buah | 1.000,- | 1.000,- | |
| | 5. Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min | buah | 500,- | 500,- | |
| 24 | ALAT UKUR PENGISI (FILLING SHINE) | | | | |
| | Untuk setiap jenis media : | | | | |
| | a. Sampai dengan 4 alat pengisi | buah | 50.000,- | 50.000,- | |
| | b. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi | buah | 15.000,- | 15.000,- | |
| 25 | METER LISTRIK (Meter kWh) | | | | |
| | a. Kelas 0,2 atau kurang | | | | |
| | 1. 3 (tiga) phasa | buah | 60.000,- | 60.000,- | |
| | 2. 1(satu) phasa | buah | 20.000,- | 20.000,- | |
| | b. Kelas 0,5 atau kelas 1 | | | | |
| | 1. 3 (tiga) phasa | buah | 7.500,- | 7.500,- | |
| | 2. 1(satu) phasa | buah | 2.500,- | 2.500,- | |
| | c. Kelas 2 | | | | |
| | 1. 3 (tiga) phasa | buah | 4.500,- | 4.500,- | |
| | 2. 1(satu) phasa | buah | 1.500,- | 1.500,- | |
| 26 | Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau tera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tari pada angka 26 huruf a, b dan c | buah | - | - | |
| 27 | PEMBATAS ARUS LISTRIK | buah | 2.000,- | 2.000,- | |
| 28 | STOP WATCH | buah | 5.000,- | 5.000,- | |
| 29 | METER PARKIR | buah | 50.000,- | 50.000,- | |
| 30 | ANAK TIMBANGAN | | | | |
| | a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) | | | | |
| | 1. Sampai dengan 1 kg | buah | 300,- | 200,- | |
| | 2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg | buah | 500,- | 300,- | |
| | 3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg | buah | 1.500,- | 500,- | |
| | b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1) | | | | |
| | 1. Sampai dengan 1 kg | buah | 1.000,- | 2.000,- | |
| | 2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg | buah | 1.500,- | 2.500,- | |
| | 3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg | buah | 7.500,- | 10.000,- | |
| | c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1) | | | | |
| | 1. Sampai dengan 1 kg | buah | 7.500,- | 15.000,- | |
| | 2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg | buah | 12.500,- | 20.000,- | |
| | 3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg | buah | 17.500,- | 35.000,- | |
| 31 | TIMBANGAN | | | | |
| | a. Sampai dengan 3.000 kg | | | | |
| | 1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV) | | | | |
| | a. Sampai dengan 25 kg | buah | 1.500,- | 2.500,- | |
| | b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg | buah | 2.500,- | 5.000,- | |
| | c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg | buah | 3.000,- | 7.500,- | |
| | d. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg | buah | 6.500,- | 10.000,- | |
| | e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg | buah | 15.000,- | 25.000,- | |
| | 2. Ketelitian halus (kelas II) | | | | |
| | a. Sampai dengan 25 kg | buah | 11.000,- | 20.000,- | |
| | b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg | buah | 18.000,- | 25000,- | |

| | | | | | |
|----|--|------|-----------|-----------|--|
| | c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg | buah | 21.000,- | 40.000,- | |
| | d. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg | buah | 24.000,- | 45.000,- | |
| | e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg | buah | 30.000,- | 50.000,- | |
| | 3. Ketelitian khusus (kelas I) | buah | 50.000,- | 100.000,- | |
| | | | | | |
| | b. Lebih dari 3.000 kg | | | | |
| | 1. Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton | buah | 6.000,- | 10.000,- | |
| | 2. Ketelitian (khusus) dan halus, setiap ton | buah | 7.500,- | 15.000,- | |
| | | | | | |
| | c. Timbangan ban berjalan | | | | |
| | 1. Sampai dengan 100 ton/h | buah | 150.000,- | 250.000,- | |
| | 2. Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h | buah | 300.000,- | 400.000,- | |
| | 3. Lebih dari 500 ton/h | buah | 450.000,- | 500.000,- | |
| | | | | | |
| 32 | ALAT UKUR TEKANAN | | | | |
| | a. Dead Weight Testing Machine | | | | |
| | 1. Sampai dengan 100 kg/cm ² | buah | 10.000,- | 10.000,- | |
| | 2. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ² | buah | 15.000,- | 15.000,- | |
| | 3. Lebih dari 1.000 kg/cm ² | buah | 25.000,- | 25.000,- | |
| | | | | | |
| | b. Alat ukur tekanan darah | buah | 15.000,- | 15.000,- | |
| | c. Manometer Minyak | | | | |
| | 1. Sampai dengan 100 kg/cm ² | buah | 7.500,- | 15.000,- | |
| | 2. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ² | buah | 10.000,- | 20.000,- | |
| | 3. Lebih dari 1.000 kg/cm ² | buah | 15.000,- | 25.000,- | |
| | d. Pressure Calibrator | buah | 30.000,- | 50.000,- | |
| | e. Pressure Recorder | | | | |
| | 1. Sampai dengan 100 kg/cm ² | buah | 7.500,- | 15.000,- | |
| | 2. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ² | buah | 15.000,- | 25.000,- | |
| | 3. Lebih dari 1.000 kg/cm ² | buah | 22.000,- | 50.000,- | |
| | | | | | |
| | PENCAP KARTU OTOMATIS (Printer Recorder) | buah | 15.000,- | 20.000,- | |
| | | | | | |
| | METER KADAR AIR | | | | |
| | a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi | buah | 15.000,- | 25.000,- | |
| | b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi | buah | 20.000,- | 40.000,- | |
| | c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi | buah | 30.000,- | 50.000,- | |
| | | | | | |
| | Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 34, atau benda/ barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam Setiap jam Bagian dari jam dihitung 1 jam | buah | 5.000,- | 5.000,- | |
| | Biaya penelitian dalam rangka izin type dan izin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada point A | jam | 10.000,- | | |
| C | Biaya tambahan | | | | |
| | 1. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu, yaitu : | | | | |
| | a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama atau lebih 25 kg | buah | 5.000,- | | |
| | b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas | buah | 10.000,- | | |
| | c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas | buah | 15.000,- | | |
| | | | | | |
| | 2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, di samping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tertentu | buah | 10.000,- | | |
| | | | | | |
| | 3. UTTP yang ditanam | buah | 10.000,- | | |
| | | | | | |
| | 4. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus | buah | 10.000,- | | |
| | | | | | |
| | 5. UTTP, termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat | buah | 1.000,- | | |

| | | | | | |
|---|--|--------|----------------------|--|--|
| | 6. UTTP, termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi tetapi terdapat di tempat UTTP yang ditanam atau terdapat di tempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus | buah | 1.000,- | | |
| D | BIAYA KALIBRASI | buah | 300% dari tarif tera | | |
| E | BIAYA PENGUJIAN BDKT | | | | |
| | Pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal Setiap jam | jam | 10.000,- | | |
| F | SERTIFIKASI DAN TABEL | | | | |
| | a. Biaya sertifikasi/ surat keterangan | lembar | 10.000,- | | |
| | b. Biaya pembuatan tabel TUT : | | | | |
| | 1. Sampai dengan 500 kL | buku | 200.000,- | | |
| | 2. Lebih dari 500 kL | buku | 350.000,- | | |

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

**LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011**

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

| | | | |
|----|--|---|-------|
| A. | Jasa Latihan Ketrampilan di Balai Latihan Kerja Pelatihan : | | |
| | 1. | Tata Niaga (per jam/sisw a) | |
| | | a. Menetik Tingkat Dasar | 1.250 |
| | | b. Administrasi Perkantoran | 1.250 |
| | | c. Akuntansi Dasar I | 1.250 |
| | | d. Sekretaris | 1.250 |
| | 2. | Bahasa (per jam/sisw a) : | |
| | | a. Basic English Course | 1.200 |
| | | b. English For Hotel Staf | 1.200 |
| | | c. English For A Shop Assistant | 1.200 |
| | | d. English For Travelling | 1.200 |
| | | e. English For Restaurant | 1.200 |
| | | f. English For Guide | 1.200 |
| | | g. Special Conversation Class | 1.200 |
| | | h. English For Job Seekers | 1.200 |
| | | i. English For Children | 1.200 |
| | | j. Bahasa Jepang | 1.250 |
| | 3. | Komputer (per jam/sisw a) : | |
| | | a. Dbase Interaktif dan Program | 1.500 |
| | | b. MS.Office Dasar | 1.500 |
| | | c. MS.Office Lanjutan | 1.500 |
| | | d. Komputer Akuntansi | 1.500 |
| | | e. Teknisi dan Perakitan Perangkat Komputer | 5.000 |
| | | f. Internet | 3.500 |
| | 4. | Aneka Kerajinan (per jam/sisw a) : | |
| | | a. Menjahit dasar | 1.500 |
| | | b. Menjahit lanjutan | 1.500 |
| | | c. Bordir dasar | 1.500 |
| | | d. Ukir kayu | 2.000 |
| | | e. Sablon | 2.000 |

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

**LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011**

TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan cara penjumlahan bobot peruntukan tata ruang, bobot keamanan, bobot jenis penggunaan menara dibagi jumlah keseluruhan koefisien bobot dikalikan 2 % (dua per seratus) NJOP Tanah dan Bangunan dengan rumus sebagai berikut :

Jumlah Retribusi yang Terutang = {(Bobot Peruntukan Tata Ruang + Bobot Keamanan + Bobot Jenis Penggunaan) : 13} x 2 % NJOP Tanah dan Bangunan.

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

| NO | OBJEK | PENGUNAAN | LOKASI | TARIF RETRIBUSI | KETERANGAN |
|----|---------------------------------|---|--|---|--|
| 1 | Tanah milik pemerintah daerah | 1. untuk pemasangan sarana reklame media luar 2. untuk tempat tinggal 3. untuk bercocok tanam 4. untuk usaha : a. komersial b. sosial 5. Pemasangan fasilitas/ sarana, limbah dan sejenisnya 6. Stasiun Pompa Bensin Umum (SPBU) 7. Jualan, PKL, dan sejenisnya 8. Tanah Galian 9. Sewa Tanah TPA | a. titik lokasi, tempat, strategis b. di titik lokasi zona A c. di titik lokasi zona B d. di titik lokasi zona C a. Selain eks kuburan b. Eks kuburan | 0,5% x NJOP 0.2 % x NJOP 0.1 % x NJOP 1 % x NJOP 6 % x NJOP 0.3 % x NJOP 6 % x NJOP 3% x NJOP Rp 1.200,- 3 % x NJOP Rp 200,- Rp 10.000,- Rp 300,- | Dilelang m ² / per minggu m ² / per minggu m ² / per minggu m ² / per tahun m ² / per tahun m ² / per tahun m ² /Per tahun m ² /Per tahun m ¹ / per tahun m ² / per tahun m ² / hari m ³ m ² / bulan Max 300 m ² |
| 2 | Lapangan | 1. Kegiatan Umum 2. Sosial dan Olahraga | a. Kelas A b. Kelas B c. Kelas C a. Kelas A b. Kelas B c. Kelas C | Rp 280,- Rp 210,- Rp 140,- Rp 2.5,- Rp 2.0,- Rp 1.5,- | m ² / kegiatan m ² / kegiatan m ² / kegiatan m ² / jam m ² / jam m ² / jam |
| 3 | Pemakaian Ruang di atas saluran | 1. Usaha Sosial 2. Usaha Komersial | | Rp 500,- 2 % x NJOP | m ² / bulan m ² / bulan |

| | | | | | | |
|---------------|----------------------------|---|---|--|---|----------------|
| 4 | Pemakaian Gedung/ Bangunan | 1. Rumah Milik Pemerintah | | | Dilelang | |
| | | 2. Rumah Khusus/ Sosial | | Rp 50.000,- | Perkamar/bulan | |
| | | 3. Rusunawa | Tempat tinggal | | | |
| | | | a. lantai dasar (penjelasan – untuk difable) | | Rp 100.000,- | Perkamar/bulan |
| | | | b. lantai I | | Rp 100.000,- | Perkamar/bulan |
| | | | c. lantai II | | Rp 90.000,- | Perkamar/bulan |
| d. lantai III | | | Rp 80.000,- | Perkamar/bulan | | |
| e. lantai IV | | Rp 70.000,- | Perkamar/bulan | | | |
| | | | | Biaya listrik dan air dibebankan kepada penyewa | | |
| | | 4. Gedung Sekolah/ Eks Gedung Sekolah/ Gedung Serba Guna | a. Untuk Usaha b. Untuk Tempat Tinggal c. Untuk Sarana OlahRaga | Tarif mengikuti aturan kios Tarif mengikuti aturan rusunawa Tarif mengikuti aturan lapangan | | |
| | | 5. Gedung Pertemuan (fasilitas untuk point a, b, c : sound, 300 kursi, 1 perangkat gamelan, screen LCD, AC) – penggunaan untuk kepentingan umum | a. Pendapi Gedhe b. Tawang Arum c. Lantai 6 Tawang Praja d. Gedung Pertemuan lainnya 1) Golongan I 2) Golongan II 3) Golongan III | Rp 6.000.000 per hari/ kegiatan Rp 4.000.000 per hari/ kegiatan Rp 1.500.000 per hari/ kegiatan Rp 400.000 per hari Rp 200.000 per hari Rp 100.000 per hari | | |
| | | 6. Shelter PKL | | Rp 1.000 per hari/ orang | | |
| 5 | Kios | 1. Golongan I | | 1.5 % x NJOP | m ² / per bulan | |
| | | 2. Golongan II | | 1.2 % x NJOP | m ² / per bulan | |
| | | 3. Golongan III | | 1 % x NJOP | m ² / per bulan | |
| | | 4. Golongan IV (untuk kios di tempat rekreasi) | | 0.5 % x NJOP | m ² / per bulan | |
| | | 5. Golongan V (untuk kios di tempat rekreasi) | | 0.3 % x NJOP | m ² / per bulan | |
| 6 | Pemakaian Kendaraan | 1. Bus sedang (25 penumpang non AC) | a. dalam kota | Rp 100.000,- | Per 6 jam* * harga sewa bus belum termasuk BBM dan pengemudi | |
| | | | b. luar kota | Rp 2.800,- | Per km** ** harga termasuk BBM dan pengemudi | |

| | | | | | |
|---|---------------------------|--|---|---|---|
| | | 2. Bis Tingkat Wisata | Sewa | Rp. 800.000,- Rp. 20.000,- | Paket 1 x kali perjalanan wisata maximal 3 jam 1 x jalan Perjalanan wisata per orang |
| | | 3. Mobil Jenazah (dalam perhitungan) | a. dalam kota b. luar kota | Rp 30.000,- Rp. | Khusus pemilik kartu PKMS gold dan Jamkesmas dibebaskan dari retribusi per jam (minimal 5 jam) |
| | | 4 Mobil Pompa Pemadam Kebakaran | a. bantuan khusus pertunjukkan yang bersifat komersial kepada swasta b. bantuan penjagaan yang bersifat non komersial kepada swasta dan instansi Pemerintah Kota Surakarta c. bantuan pemompaan selama berlangsungnya bantuan penjagaan tersebut pada huruf a dan b d. bantuan khusus pemompaan tanpa bantuan penjaga termasuk penggantian harga bahan bakar selama berlangsungnya pemompaan | Rp 100.000,- Rp 60.000,- Rp 50.000 Rp 150.000,- | per jam (minimal 5 jam) per jam (minimal 5 jam) per tangki per tangki |
| 7 | Pemakaian alat-alat berat | 1. Dump Truck 2. Mesin Gilas 3. Tandem Roller 4. Sky Walker 5. Back Hoe 6. Toilet Container | a. ukuran 6,8 ton b. ukuran < 6,8 ton | Rp 100.000 Rp 100.000 Rp 75.000 Rp 100.000 Rp 130.000 Rp 400.000 Rp 360.000 | Per hari/ 7 jam* (tarif dalam kota) Per hari/ 7 jam* Per hari/ 7 jam* Per hari/ 7 jam* Max 7 jam* selebihnya ditambah 20 %/jam Per hari/ 7 jam* 1 x 24 jam* |
| | | | | *Tarif sewa alat berat belum termasuk BBM dan operator/driver | |

| | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|
| 8 | Pemakaian kolam ikan | 1. kolam semi permanen 2. kolam permanen | | Rp 750 Rp 75.000 | Per m ² / bulan Per bak/bulan |
| 9 | Pemakaian Depo Ikan | Kios Ikan non fasilitas Kios Ikan dengan fasilitas | | Rp 300.000 Rp 500.000 | Per kios/bulan Per kios/bulan |
| 10 | Pemakaian Pasar Ikan | Balekambang | | | dilelang |
| 11 | Pemakaian insenerator atau pembakaran sampah pada klinis (dari luar RS) | 1. berat 1 s/d 5 kg 2. berat 6 s/d 10 kg | a. jasa sarana b. jasa pelayanan a. jasa sarana b. jasa pelayanan | Rp 4.500,- Rp 3.000,- Rp 9.000,- Rp 6.000,- | Tarif adalah jasa sarana ditambah jasa pelayanan |

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

**LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011**

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

| Jenis Retribusi | Pelayanan yang diberikan | Tarif | Keterangan |
|---|---|--|--|
| Bus non ekonomi (AKAP/AKDP) Bus ekonomi (AKAP) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Parkir jalur penurunan ▪ Parkir jalur istirahat ▪ Parkir jalur pemberangkatan ▪ Kebersihan | 5.000,- | 1 x masuk Max 2 jam, tiap 2 jam kelebihan dikenakan tarif tambahan sebesar 50 % dari besarnya tarif retribusi yang ditetapkan |
| Bus Ekonomi (AKDP) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Parkir jalur penurunan ▪ Parkir jalur istirahat ▪ Parkir jalur pemberangkatan ▪ Kebersihan | 3.000,- | 1 x masuk Max 2 jam, tiap 2 jam kelebihan dikenakan tarif tambahan sebesar 50 % dari besarnya tarif retribusi yang ditetapkan |
| Bus Pedesaan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Parkir jalur penurunan ▪ Parkir jalur istirahat ▪ Parkir jalur pemberangkatan ▪ Kebersihan | 1.000,- | 1 x masuk Max 2 jam, tiap 2 jam kelebihan dikenakan tarif tambahan sebesar 50 % dari besarnya tarif retribusi yang ditetapkan |
| Angkutan Kota/ Perkotaan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Parkir jalur penurunan ▪ Parkir jalur istirahat ▪ Parkir jalur pemberangkatan ▪ Kebersihan | 500,- | 1 x masuk Max 2 jam, tiap 2 jam kelebihan dikenakan tarif tambahan sebesar 50 % dari besarnya tarif retribusi yang ditetapkan |
| Angkutan Antar Jemput | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Parkir di fasilitas parkir ▪ Parkir jalur istirahat | 2.000,- | 1 x masuk Max 2 jam, tiap 2 jam kelebihan dikenakan tarif tambahan sebesar 50 % dari besarnya tarif retribusi yang ditetapkan |
| Sewa Kios | Tempat usaha dagang dan kebersihan | <i>220,-/ m² per hari</i> <i>180,-/ m² per hari</i> <i>150,-/ m² per hari</i> | <i>Type A</i> <i>Type B</i> <i>Type C</i> |
| Sewa Locket Bus Malam | Tempat penjualan karcis bus/non-bus | 2.500,- | Per hari |
| Jasa Ruang Tunggu | Ruang tunggu, penerangan, tempat duduk, pusat informasi | 500,- | 1 x masuk |
| Cuci Bus | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bus Besar ▪ Bus Kecil | 15.000,- 10.000,- | Per bus Per bus |
| <i>Jasa Penitipan Barang</i> | <i>Fasilitas penitipan barang</i> | <i>250,-/kg</i> | <i>Per Hari</i> |

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

| Jenis tempat | Jenis kendaraan | Tarif sekali Parkir (Rp) | Keterangan |
|--------------|--------------------------------|--------------------------|--|
| a. Pelataran | Sepeda | 500 | Satu kali parkir maksimum 1 (satu) jam, tiap satu jam kelebihan dikenakan tarif tambahan sebesar 100 % dari besarnya tarif retribusi yang ditetapkan. |
| | Andong/Dokar/Becak | 500 | |
| | Sepeda Motor | 1.000 | |
| | Mobil Penumpang/ Taxi/ Pick Up | 2.000 | |
| | Bus Sedang/ Truck Sedang | 4.000 | |
| | Bus Besar/ Truck Besar | 8.000 | |
| b. Taman | Sepeda | 500 | Kelebihan jam parkir kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam. Dikecualikan bagi terminal dan pasar tradisional satu kali parkir maksimum 12 jam, tiap 12 jam kelebihan dikenakan tarif tambahan sebesar 100 % dari besarnya tarif retribusi yang ditetapkan. |
| | Andong/Dokar/Becak | 500 | |
| | Sepeda Motor | 1.000 | |
| | Mobil Penumpang/ Taxi/ Pick Up | 2.000 | |
| | Bus Sedang/ Truck Sedang | 4.000 | |
| | Bus Besar/ Truck Besar | 8.000 | |
| c. Gedung | Sepeda | 500 | Untuk bongkar muat (pasar) dikenakan tarif progresif tiap 2 jam. Khusus untuk : Anak sekolah, Tempat Ibadah, Karyawan toko, Pedagang pasar, Pasien rumah sakit tidak dikenakan tarif progresif |
| | Sepeda Motor | 1.000 | |
| | Mobil Penumpang/ Taxi/ Pick Up | 2.000 | |
| | Bus Sedang/ Truck Sedang | 4.000 | |
| | | | |

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011

TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGARAHAN/VILLA

| NO. | JENIS TEMPAT | URAIAN | TARIF (RP.) |
|------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Kamar Biasa | | |
| | a. hari biasa | Jam 13.00 - 13.00 | 30.000 |
| | b. hari libur | Jam 13.00 - 13.00 | 50.000 |
| 2 | Kamar Moderat | | |
| | a. hari biasa | Jam 13.00 - 13.00 | 50.000 |
| | b. hari libur | Jam 13.00 - 13.00 | 75.000 |
| 3 | Villa | | |
| | a. hari biasa | Jam 13.00 - 13.00 | 150.000 |
| | b. hari raya dan tahun baru | Jam 13.00 - 13.00 | 250.000 |

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011

TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

| NO. | JENIS TERNAK | TARIF |
|------------|---------------------|---------------|
| 1. | Sapi/Kerbau/Kuda | 25.000,-/Ekor |
| 2. | Babi | 20.000,-/Ekor |
| 3. | Kambing/Domba | 1.500,-/Ekor |
| 4. | Unggas/Ayam | 50,-/Ekor |

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

| NO. | JENIS PUNGUTAN | TARIF (Rp.) | URAIAN |
|---|--|---|--|
| I. PEMANFAATAN LAHAN DALAM TAMAN WISATA DAERAH | | | |
| 1. | Pemanfaatan Lahan - Strategis - Kurang Strategis - Tidak Strategis | 1000,- 500,- 300,- | Per m ² tiap hari Per m ² tiap hari Per m ² tiap hari |
| II. FASILITAS DALAM TAMAN WISATA SRIWEDARI | | | |
| 1. | Karcis Masuk | 500,- 1000,- | 1 x masuk (hari biasa) 1x masuk (hari libur/ hari besar) Pada hari-hari tertentu kartu bebas tidak berlaku |
| 2. | Karcis Jualan | 500,- | Per m ² tiap hari |
| 3. | Karcis Parkir Sepeda | 500,- | Sekali parkir |
| 4. | Karcis Parkir Sepeda Motor | 1.000,- | Sekali parkir |
| 5. | Karcis Parkir Mobil | 2.000,- | Sekali parkir |
| 6. | Karcis Parkir Bus | 5.000,- | Sekali parkir |
| 7. | KA Kelinci | 2.500,- | Pengoperasian 1 x putaran satu rangkaian |
| 8. | Perahu | 2.000,- | Pengoperasian 1 x putaran satu rangkaian |
| 9. | Pancingan | 2.000,- | Per orang per 2 jam |
| 10. | Sewa Kolam/ Segaran | 300.000,- | Per hari |
| 11. | Wayang Orang a. Karcis utama/VIP b. Karcis kelas I c. Karcis kelas II/ Balkon d. Borongan wayang orang - hari biasa - malam minggu e. sewa gedung wayang orang - untuk sosial malam hari siang hari - untuk komersial malam hari siang hari | 3.000,- 1.500,- 1.000,- 1.000.000,- 1.500.000,- 500.000,- 400.000,- 1.000.000,- 750.000,- | Per orang Per orang Per orang 1 x pentas 1 x pentas 1 x pemakaian 1 x pemakaian |
| 12. | Persewaan Gedung Joglo - mulai jam 07.00 – 18.00 - mulai 18.00 – 07.00 | 300.000,- 400.000,- | Belum termasuk biaya penambahan listrik |
| 13. | Persewaan Los Keliling Joglo - mulai jam 07.00 – 18.00 - mulai 18.00 – 07.00 | 500,- 1.000,- | Per m ² tiap hari Per m ² tiap hari |
| III. FASILITAS DALAM TAMAN BALEKAMBANG | | | |
| 1. | Pemanfaatan Lahan a. Umum - hari biasa - hari libur | 100,- 200,- | Per m ² /6 jam* Per m ² /6 jam* |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | b. Sosial - hari biasa - hari libur | 50,- 100,- | Per m2/6 jam* Per m2/6 jam* * untuk luas minimal 1000 m2 Kurang dari 6 jam dihitung 6 jam, lebih dari 6 jam dikenakan tarif tambahan |
| 2. | Gedung a. Gedung Kesenian - siang - malam b. Open Stage - siang - malam c. Balai Tirtoyoso d. Balai Apung | 1.500.000,- 1.750.000,- 600.000,- 750.000,- 200.000,- 200.000,- | 1 x pakai selama 6 jam 1 x pakai selama 6 jam 1 x pakai selama 6 jam 1 x pakai selama 6 jam |
| 3. | Kolam | 500.000,- | 1 x pakai selama 6 jam |
| 4. | Sepeda Air | | |
| 5. | Taman Reptil | | |
| 6. | Outbond a. Sewa Peralatan high rope b. Sewa Peralatan low rope | 500.000,- 350.000,- | 1 x pakai selama 6 jam 1 x pakai selama 6 jam |
| IV. LAPANGAN TENIS BALAI ISTIRAHAT MALIAWAN | | | |
| | Sewa Lapangan Tenis | 15.000,- | Per jam |

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

**LAMPIRAN XIX : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011**

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

a. Tarif Retribusi Penjualan Benih Ikan dan Ikan Konsumsi

| NO | JENIS IKAN | HARGA BENIH IKAN PER 100 EKOR (RP.) | | | | HARGA IKAN |
|----|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| | | Ukuran Ikan 1- 3 cm | Ukuran Ikan 3 - 5 cm | Ukuran Ikan 5 - 7 cm | Ukuran Ikan 7 - 9 cm | |
| 1 | Nila Merah | 5.000 | 7.500 | 12.500 | 15.000 | Menyesuaikan harga pasar |
| 2 | Nila Hitam | 5.000 | 7.500 | 12.500 | 15.000 | |
| 3 | Lele | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | |
| 4 | Gurame | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | |
| 5 | Tombro | 7.000 | 13.000 | 20.000 | 25.000 | |
| 6 | Karper | 3.000 | 4.000 | 6.000 | 7.000 | |
| 7 | Tawes | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 5.000 | |
| 8 | Koki | 20.000 | 30.000 | - | - | |
| 9 | Komet | 30.000 | 40.000 | - | - | |
| 10 | Moly biasa | 7.500 | 10.000 | - | - | |
| 11 | Moly Balon | 10.000 | 15.000 | - | - | |
| 12 | Koi | 55.000 | 80.000 | 120.000 | - | |

b. Tarif Retribusi Penjualan Bibit Tanaman

| No | Komoditas | Jenis Tanaman | Harga | Keterangan |
|----|--------------|--|------------------|------------|
| 1 | Tanaman Hias | - Anggrek dendrobium Remaja - Anggrek dendrobium berbunga | 6.000 17.500 | |
| 2 | Bibit Buah | - Mangga 1 meter okulasi - Belimbing 1 meter okulasi | 10.000 10.000 | |

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

**LAMPIRAN XX : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011**

TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

| No | Jenis Bangunan | Klas Bangunan | Nilai Bangunan/ m2 | Tarif Retribusi/ m2 (Rp.) | Keterangan |
|----------------|---|-----------------|-----------------------|---------------------------------|--|
| 1 | Bangunan Gedung Tidak Bertingkat | Sederhana | 1.594.034 | 27.895 | |
| | | Tidak Sederhana | 1.912.841 | 33.474 | |
| 2 | Bangunan Gedung Bertingkat | Sederhana | 2.232.555 | 39.069 | Bagi bangunan bertingkat lebih dari satu lantai dikalikan koefisien nilai bangunan |
| | | Tidak Sederhana | 2.679.067 | 46.883 | |
| 3 | Pagar Depan | Sederhana | 420.712 | 7.362 | Lt. 1 x 1.000 |
| | | Tidak Sederhana | 504.855 | 8.834 | |
| 4 | Pagar Samping/ Belakang | Sederhana | 408.094 | 7.141 | Lt. 3 x 1.120 |
| | | Tidak Sederhana | 489.712 | 8.569 | Lt. 4 x 1.135 Lt. 5 x 1.162 Lt. 6 x 1.197 |
| 5 | Rumah Permanen | Sederhana | 1.399.602 | 24.493 | Lt. 7 x 1.236 |
| | | Tidak Sederhana | 1.679.522 | 29.391 | Lt. 8 x 1.263 Lt. 9 x 1.291 |
| 6 | Rumah Permanen Bertingkat/Loteng | Sederhana | 1.594.034 | 27.895 | Lt. 10 x 1.323 |
| | | Tidak Sederhana | 1.912.841 | 33.474 | Lt. 11 x 1.352 Lt. 12 x 1.381 Lt. 13 x 1.440 |
| 7 | Fasilitas a. Tempat Parkir 1. Aspal 2. Conblok b. Taman c. Saluran | | | | Lt. 14 x 1.439 |
| | | | | | Lt. 15 x 1.460 |
| | | | | | Lt. 16 x 1.497 |
| | | | | | Lt. 17 x 1.526 |
| | | | | | Lt. 18 x 1.555 |
| | | | | | Lt. 19 x 1.584 |
| | | | | | Lt. 20 x 1.613 |
| | | | | | Lt. 21 x 1.642 |
| | | | | | Lt. 22 x 1.671 |
| | | | | | Lt. 23 x 1.700 |
| | | | | | Lt. 24 x 1.729 |
| | | | | | Lt. 25 x 1.758 |
| | | | | | Lt. 26 x 1.787 |
| | | | | | Lt. 27 x 1.816 |
| Lt. 28 x 1.845 | | | | | |
| Lt. 29 x 1.874 | | | | | |
| Lt. 30 x 1.903 | | | | | |

**DAFTAR PENGHITUNGAN NILAI BANGUNAN DAN BESARNYA RETRIBUSI
PER METER PERSEGI**

RUMAH PERMANEN SEDERHANA =

$$\frac{1.893.579,22}{115} \times 85 = \text{Rp.}1.399.602,03 \times 1,75\% = \text{Rp.} 24.493$$

RUMAH PERMANEN TIDAK SEDERHANA =

$$\frac{1.893.579,22}{115} \times 85 = \text{Rp.}1.399.602,03 \times 1,2\% = \text{Rp.}16.795,34 \times 1,75\% = \text{Rp.} 29.391,845$$

RUMAH PERMANEN BERTINGKAT SEDERHANA =

$$\frac{2.156.636,49}{115} \times 85 = \text{Rp.}1.594.035,67 \times 1,75\% = \text{Rp.} 27.895$$

RUMAH PERMANEN BERTINGKAT TIDAK SEDERHANA =

$$\frac{2.156.636,49}{115} \times 85 = \text{Rp.}1.594.035,67 \times 1,2\% = \text{Rp.}11.912.842,80 \times 1,75\% = \text{Rp.} 33.474$$

BANGUNAN GEDUNG TIDAK BERTINGKAT SEDERHANA =

$$\frac{2.156.636,49}{115} \times 85 = \text{Rp.}1.594.035,67 \times 1,75\% = \text{Rp.} 27.895$$

BANGUNAN GEDUNG TIDAK BERTINGKAT TIDAK SEDERHANA =

$$\frac{2.156.636,49}{115} \times 85 = \text{Rp.}1.594.035,67 \times 1,2\% = \text{Rp.}11.912.842,80 \times 1,75\% = \text{Rp.} 33.474$$

BANGUNAN GEDUNG BERTINGKAT SEDERHANA =

$$\frac{3.020.516,74}{115} \times 85 = \text{Rp.} 2.232.555,85 \times 1,75\% = \text{Rp.} 39.069$$

BANGUNAN GEDUNG BERTINGKAT TIDAK SEDERHANA =

$$\frac{3.020.516,74}{115} \times 85 = \text{Rp.} 2.232.555,85 \times 1,2\% = \text{Rp.} 2.679.067,02 \times 1,75\% = \text{Rp.} 46.883$$

PAGAR DEPAN SEDERHANA =

$$\frac{569.199,80}{115} \times 85 = \text{Rp.} 420.712,90 \times 1,75\% = \text{Rp.} 7.362$$

PAGAR DEPAN TIDAK SEDERHANA =

$$\frac{569.199,80}{115} \times 85 = \text{Rp.} 420.712,90 \times 1,2\% = \text{Rp.} 504.855,47 \times 1,75\% = \text{Rp.} 8.834$$

PAGAR SAMPING/ BELAKANG SEDERHANA =

$$\frac{552.127,20}{115} \times 85 = \text{Rp.} 408.094,02 \times 1,75\% = \text{Rp.} 7.141$$

PAGAR SAMPING/ BELAKANG TIDAK SEDERHANA =

$$\frac{552.127,20}{115} \times 85 = \text{Rp.} 408.094,02 \times 1,2\% = \text{Rp.} 489.712,82 \times 1,75\% = \text{Rp.} 8.569$$

FASILITAS

1. RUANG PARKIR
 - a. ASPAL : $72.843,96 - 15 \% = \text{Rp. } 61.917,37 \times 1,75 \% = \text{Rp. } 1.083$
 - b. CONBLOK/ PAVING : $62.256,95 - 15 \% = \text{Rp. } 52.918,41 \times 1,75 \% = \text{Rp. } 926$

2. TAMAN
 - a. TIDAK SEDERHANA : $350.000 \times 1,75 \% = \text{Rp. } 6.125$
 - b. SEDERHANA : $150.000 \times 1,75 \% = \text{Rp. } 2.625$

3. SALURAN : $34.582,42 \times 85 \% = \text{Rp. } 29.395 \times 1,75 \% = \text{Rp. } 514$

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

LAMPIRAN XXI : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011

TARIF RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

| NO | TEMPAT USAHA | TARIF (Rp.) | KETERANGAN |
|-----------|--|--------------------|-------------------|
| 1 | Hotel Berbintang 3 | 1.500.000,- | per tahun |
| 2 | Hotel Berbintang 4 | 2.000.000,- | per tahun |
| 3 | Hotel Berbintang 5 | 2.500.000,- | per tahun |
| 4 | Restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Selaka | 1.000.000,- | per tahun |
| 5 | Bar, Pub, Diskotik | 1.000.000,- | per tahun |

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

LAMPIRAN XXII : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011

TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Untuk setiap pemberian Izin Gangguan retribusinya diperhitungkan sebagai berikut :

a. Menurut Luas Ruang Tempat Usaha :

| Luas Ruang Tempat Usaha | Keterangan |
|---|----------------------------|
| 1 m ² - 200 m ² | Rp. 1.000,-/m ² |
| 201 m ² - 500 m ² | Rp. 1.875,-/m ² |
| 501 m ² ke atas | Rp. 2.750,-/m ² |

b. Menurut Penggunaan Mesin :

| Penggunaan Mesin | Keterangan |
|------------------|-----------------|
| 1 pk - 10 pk | Rp. 2.500,-/pk |
| 11 pk - 100 pk | Rp. 3.750,-/ pk |
| 101 pk ke atas | Rp. 5.000,-/ pk |

c. Menurut Penggolongan Usaha :

| Penggolongan Usaha | Keterangan |
|--------------------|---------------|
| Usaha Kecil | Rp. 62.500,- |
| Usaha Menengah | Rp. 250.000,- |
| Usaha Besar | Rp. 500.000,- |

d. Menurut Klasifikasi Jalan (Lokasi) :

| Klasifikasi Jalan (Lokasi) | Keterangan |
|----------------------------|------------------|
| Di tepi jalan klas I | 40% dari (a+b+c) |
| Di tepi jalan klas II | 30% dari (a+b+c) |
| Di tepi jalan klas III | 20% dari (a+b+c) |
| Di tepi jalan klas IV | 10% dari (a+b+c) |

e. Biaya Pemeriksaan dan Penelitian :

| Pemeriksaan dan Penelitian | Keterangan |
|----------------------------|------------------|
| Usaha Kecil | 5% dari (a+b+c) |
| Usaha Sedang | 10% dari (a+b+c) |
| Usaha Besar | 20% dari (a+b+c) |

f. Menurut Klasifikasi Gedung :

| Klasifikasi Gedung | Keterangan |
|--|------------------|
| 1 Lantai | 20% dari (a+b+c) |
| 2 Lantai | 30% dari (a+b+c) |
| 3 s/d 5 Lantai | 40% dari (a+b+c) |
| 6 Lantai Ke Atas | 50% dari (a+b+c) |
| Lantai Dasar ditambah 10% dari (a+b+c) | |

g. Yang Menggunakan Sistem Shif : dikenakan 50% dari (a+b+c)

h. Pendaftaran Ulang :

| Pendaftaran Ulang | Keterangan |
|--------------------------|----------------------------|
| Usaha Kecil | Rp. 62.500,-/tahun |
| Usaha Sedang | Rp. 162.500,-/tahun |
| Usaha Besar | Rp. 375.000,-/tahun |

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

LAMPIRAN XXIII : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011

TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

| NO | JENIS PERIZINAN | TARIF (Rp.) | KETERANGAN |
|-----------|--|--------------------|--|
| 1 | Izin Trayek Mobil Bus | | |
| | a. Mobil bus kapasitas tempat duduk 10-15 | 150.000,- | Per kendaraan setiap 5 tahun termasuk kartu pengawasan |
| | b. Mobil bus kapasitas 16-27 | 250.000,- | |
| | c. Mobil bus kapasitas tempat duduk 28 ke atas | 300.000,- | |
| 2 | Izin Operasi/Trayek untuk Mobil Penumpang/Taxi | 150.000,- | Per kendaraan setiap 5 tahun termasuk kartu pengawasan |
| 3 | Izin Insidentil | | |
| | a. Mobil bus kapasitas tempat duduk 10-15 | 15.000,- | 1 x perjalanan |
| | b. Mobil bus kapasitas 16-27 | 20.000,- | 1 x perjalanan |
| | c. Mobil bus kapasitas tempat duduk 28 ke atas | 25.000,- | 1 x perjalanan |
| | d. Mobil Penumpang/Taxi | 10.000 | 1 x perjalanan |

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO